

# TABLOID SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU  
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000  
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

[www.tabloidsinartani.com](http://www.tabloidsinartani.com)

Hotline/SMS : 081317575066  
e-mail : [redaksi@sinartani.co.id](mailto:redaksi@sinartani.co.id)

[www.sinartani.co.id](http://www.sinartani.co.id)

Edisi 9 - 15 Juli 2025

No. 4094  
Tahun LV



7 Transformasi Penyuluh Pertanian

9 'Rumah' Penyuluh Pertanian  
Pasca Inpres

11 Langgar Harga Minimal Ayam Hidup,  
Kena Kartu Merah



## MERAJUT ASA KOPERASI DESA MERAH PUTIH



[www.tabloidsinartani.com](http://www.tabloidsinartani.com)



[tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)



[@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST)



[tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)



[SINTA TV](https://www.youtube.com/SINTA_TV)

**FDK** An Agricultural  
Company

# BoomFlower<sup>®</sup> BOOMBASTIS



### Akselerator Tanaman

- ✓ Mempercepat penyerapan unsur hara,
- ✓ Mempercepat adaptasi dan pemulihan tanaman,
- ✓ Mempercepat pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman.





## EDITORIAL

## Jalan Panjang Koperasi

Bagi bangsa Indonesia, 12 Juli merupakan tanggal bersejarah bagi dunia Koperasi. Penetapan tanggal tersebut bukan tanpa alasan. Tapi merupakan bagian dari perjalanan kelembagaan yang mengakar di desa.

Seperti diketahui, setelah Indonesia Merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Saat itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di kota tersebut.

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Moh. Hatta yang juga Wakil Presiden Indonesia pertama mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Moh. Hatta mengusulkan didirikan tiga jenis koperasi.

Pertama, koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Kemudian di era Orde Baru, Pemerintahan Soeharto kembali membangun koperasi dengan nama Koperasi Unit Desa (KUD). KUD menjadi salah satu kelembagaan ekonomi di desa, khususnya untuk membantu petani. Sejarah KUD seperti dikutip dari laman Induk KUD, pada tahun 1963, pemerintah memprakarsai pembentukan Koperta dikalangan petani. Produk utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok, terutama padi.

Pada tahun 1966-1967, pemerintah membangun BUUD (Badan Usaha Unit Desa) sebagai tindak lanjut dari Koperta. Tugas utamanya membantu petani mengatasi masalah produksi, termasuk kredit, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

Tugas BUUD membeli gabah, menggiling dan menyetor beras ke Bulog (Bulog yang ada di daerah), serta menjadi sebagai penyalur pupuk. Kemudian, konsep pengembangan koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUUD/KUD. Lalu, lahirlah KUD yang secara bertahap menggantikan peran BUUD.

Tahun pertama perkembangan KUD sangatlah pesat, terutama tahun 1970-an. Kehadiran KUD memang tidak terlepas dari strategi pemerintah, khususnya dalam pengadaan pangan gabah/beras Bulog. Sayangnya, peran KUD saat era reformasi atau kejatuhan Orde Baru semakin merosot.

Terbitnya, Inpres No. 18 Tahun 1998, KUD tidak lagi menjadi pemain tunggal di tingkat kecamatan. Program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya melalui KUD diserahkan mekanisme pasar. Kondisi ini mengakibatkan banyak KUD mengalami penurunan kinerja, bahkan tidak sedikit yang hanya tinggal papan nama.

Kegiatan pokok KUD dalam perekonomian pedesaan yang sebagian besar pertanian semakin menghilang. Mirisnya kemudian tersebar istilah KUD (Ketua Untung Duluan) yang makin membuat kesan miring lembaga tersebut.

Kini Pemerintahan Prabowo Subianto mencoba mengangkat kembali koperasi dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rencananya pada 12 Juli 2025 akan diluncurkan di Klaten, Jawa Tengah. Dengan target berdiri 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berharap koperasi tersebut dapat mengangkat perekonomian desa. Pekerjaan Rumah yang tak semudah membalikkan telapak tangan.

SAUNG TANI



**Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada peringatan Hari Koperasi**

- Meluncur dan terus berjalan

**Pemerintah tarik penyuluh pertanian daerah ke pusat**

- Ditarik dan diberdayakan

**Wapres Gibran dan Mentan Amran kembali tegas pencapaian swasembada gula di Yogyakarta.**

- Berharap nasib petani tebu juga manis



Desain Cover: Budi Putra K.  
Foto Cover: Freepik AI

**Pemimpin Umum/Penanggung Jawab :** Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter:** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

**Penerbit:** PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama:** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo

**Direktur Utama:** DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS

**Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan:** Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

**Email:** redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan:** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



**Andi Amran Sulaiman**  
*Menteri Pertanian RI*

**Terima Kasih**  
**Penyuluh**  
**Pertanian**

Dalam peringatan Hari Krida Pertanian ke-53, kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di seluruh Indonesia. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi seluruh insan pertanian untuk merayakan capaian besar sektor pertanian yang tidak lepas dari kontribusi dari para penyuluh lapangan.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah tonggak sejarah Republik Indonesia. Kita berhasil mencatatkan stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yakni 4,2 juta ton. Ini adalah capaian luar biasa hasil kerja keras kita semua.

Capaian ini tak hanya diakui secara nasional, namun juga mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Data dari USDA (United States Department of Agriculture) mencatat produksi padi Indonesia mencapai 34,6 juta ton, melebihi target 32 juta ton. Sementara FAO juga mengestimasi produksi padi Indonesia berada di kisaran 35,6 juta ton lebih, menunjukkan kepercayaan global terhadap kinerja pertanian Indonesia.

Kami juga mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian, termasuk dalam reformasi distribusi pupuk subsidi yang kini dipermudah. Dulu pupuk harus muter ke 12 kementerian, harus ada tanda tangan dari 38 gubernur, 500 bupati/wali kota.

Kami menegaskan bahwa PPL bersama Babinsa kini menjadi ujung tombak pertanian nasional. Mereka adalah "mata dan telinga" Presiden RI dan Kementerian Pertanian (Kementan) di lapangan. Saya titip, laporkan kalau ada penyimpangan. Kalau ada harga di atas HET, laporkan! Kami akan tindak tegas. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh PPL Indonesia.

Hingga kini sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. Sejarah mencatat sektor pertanian selalu menjadi penopang utama ekonomi nasional, terutama di masa krisis ketika perubahan iklim ekstrem, ketidakpastian global akibat perang militer dan perang tarif yang melumpuhkan berbagai sektor. Sampai saat ini pertanian tetap menjadi kokoh sebagai sumber devisa negara, menyerap tenaga kerja, menyediakan pangan, dan menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat.

Saat ini sejumlah capaian signifikan di sektor produksi dan cadangan pangan. Hingga Juni 2025, serapan beras Bulog telah mencapai 2,6 juta ton. Sekarang ini gabah petani dibeli langsung oleh Bulog, kalau dulu melalui tengkulak. Stok beras kita sebanyak 4,2 juta ton dan ini terbesar sepanjang sejarah 57 tahun Indonesia Merdeka.

Karena itu kita patut bersyukur. Luas panen dan produksi beras nasional mengalami lonjakan. BPS proyeksi produksi beras Januari-Agustus tembus 24,97 juta ton. Ke depan mimpi besar kita mudah-mudahan ini konsisten, Indonesia pada saatnya nanti menjadi lumbung pangan dunia.

Dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,5 juta orang per tahun, kita harus memikirkan dari mana pangannya. Saat ini dunia tengah tidak baik-baik saja, krisis pangan mulai melanda dunia. Malaysia, Filipina dan Jepang, produksi pangannya tidak baik-baik saja. Bahkan harga berasnya mencapai Rp 100 ribu perkg. Kami baru pulang dari Singapura, Malaysia, Yordania dan Rusia. Semua negara tengah kesulitan pangan karena ada perubahan iklim. Alhamdulillah kita bersyukur harga beras masih dalam baik-baik saja.



**PINDAI BARCODE!**  
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.





# Sambung Batang, Sambung Harapan Panen Semangka

Sering gagal panen gara-gara semangka mendadak layu? Saatnya beralih ke teknik grafting! Sambung batang semangka non-biji dengan labu tahan penyakit, panen pun jadi aman dan melimpah!



1. Persiapan Benih
  - Batang bawah: Gunakan varietas labu lokal (*Cucurbita moschata*) yang terbukti tahan penyakit.
  - Batang atas: Pilih varietas semangka non-biji F1 seperti 'Harmony' atau 'Aulia' dengan daya hasil tinggi.
2. Penyemaian Serentak
 

Batang bawah disemai 2-3 hari lebih awal dari batang atas agar memiliki ukuran batang yang seimbang saat disambung.
3. Penyambungan (Grafting)
  - Lakukan saat tanaman berumur 7-10 hari.
  - Metode yang umum digunakan: splice grafting (potong miring 45°), lalu sambungkan dan ikat dengan klip plastik grafting.
  - Tempatkan di ruang lembap dengan naungan selama 5-7 hari.
4. Pemeliharaan Pasca Grafting
  - Lakukan aklimatisasi secara bertahap terhadap sinar matahari.
  - Setelah tunas menunjukkan pertumbuhan aktif, tanaman siap pindah ke lapangan.

## Manfaat Jangka Panjang untuk Petani

Dalam uji adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, semangka grafting menunjukkan tingkat keberhasilan panen hingga 92% pada lahan infeksius, dibandingkan hanya 48% pada semangka tanpa grafting.

"Petani semangka biasanya mengeluh kalau lahannya sudah kena fusarium, panennya tinggal pasrah. Tapi dengan grafting, panen tetap bisa diandalkan," terang Eko Prasetyo, penyuluh senior Kecamatan Wlingi yang sudah melatih 12 kelompok tani dalam teknik ini sejak 2022.

Tak hanya itu, grafting juga memperpanjang masa tanam, memperkuat sistem akar, serta meningkatkan efisiensi pemupukan. Ini menjadi nilai tambah dalam skema pertanian berkelanjutan berbasis teknologi lokal.

**Penulis: Susi Deliana**  
Penyuluh Pertanian Pusat

Tanaman semangka non-biji dikenal sebagai primadona musiman di lahan kering Indonesia. Namun, ancaman penyakit tular tanah seperti layu fusarium (*Fusarium oxysporum f.sp. niveum*) terus menjadi momok bagi petani. Untuk mengantisipasi hal ini, para penyuluh pertanian kini didorong untuk menguasai teknik grafting alias sambung batang, dengan memanfaatkan batang bawah dari tanaman *Cucurbitaceae* yang tahan penyakit.

Grafting semangka bukan sekadar teknik canggih nan elit, tapi kian menjadi kebutuhan lapangan dalam sistem pertanian modern yang

adaptif terhadap perubahan iklim dan peningkatan tekanan penyakit.

Seperti diketahui, layu fusarium merupakan penyakit sistemik yang menyerang akar dan pembuluh tanaman, sehingga tanaman mendadak layu dan mati. Benih unggul sekalipun rentan terserang jika ditanam di lahan yang sudah terkontaminasi cendawan patogen tersebut.

Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang sekarang menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (BRMP Hortikultura), grafting semangka dengan batang bawah *Cucurbita moschata* (seperti labu jipang, labu parang, atau labu

lanjangan) atau *Lagenaria siceraria* (labu air, labu botol) terbukti menekan intensitas serangan layu fusarium hingga 80%, berdasarkan hasil uji lapangan di Karangploso, Malang pada 2023. "Kunci keberhasilannya terletak pada ketepatan pemilihan rootstock yang memiliki toleransi tinggi terhadap patogen tanah," ujarnya.

## Langkah Praktis Grafting

Bagi penyuluh pertanian, menyampaikan materi teknik grafting perlu dikemas dalam format yang mudah dipraktikkan oleh petani. Berikut alur teknis yang disarikan dari modul pelatihan BBPP Lembang.

## Ampas Tebu, Jangan Dibuang!

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat swasembada gula nasional. Dalam acara "Rembuk Tani Bersama Wakil Presiden RI" di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisucipto, Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kembali target swasembada gula konsumsi pada tahun 2026 dan gula industri pada 2028.

Dengan potensi produksi tebu yang akan terus meningkat akan terdapat limbah ampas tebu yang cukup banyak. Indonesia bisa belajar pemanfaatan ampas tebu dari negara-negara produsen tebu. Di Brazil abu ampas tebu dimanfaatkan dalam pembangunan jalan. Produk sampingan tebu yang dihasilkan dalam jumlah

besar oleh industri gula, kini digunakan sebagai bahan campuran aspal untuk membangun jalan yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan ramah lingkungan.

Campuran aspal yang mengandung abu ampas tebu telah menunjukkan kapasitas menahan beban lebih tinggi, ketahanan yang lebih baik terhadap pelapukan dan mengurangi keretakan dan kerusakan pada permukaan jalan.

Sementara di India ampas tebu dimanfaatkan untuk campuran beton. Sebuah sekolah dasar di India dibangun menggunakan blok rendah karbon yang terbuat dari limbah tebu yang diberi nama sugarcree. Staf dan mahasiswa dari University of East London (UEL) telah berkolaborasi untuk membangun sekolah di India menggunakan Sugarcree, biomaterial inovatif yang terbuat dari limbah tebu.

Sugarcree rendah karbon, yang dikembangkan pada tahun 2023 oleh University of East London (UEL) terbuat dari ampas tebu, produk sampingan berserat tebu, Sugarcree dipadukan dengan pengikat mineral dan dibentuk menjadi blok yang saling terkait. Bahan inovatif ini memiliki jejak karbon enam kali lebih kecil daripada batu bata tanah liat tradisional, sehingga menawarkan opsi konstruksi yang lebih berkelanjutan, lebih fleksibel sehingga tahan gempa.

Selain itu, di India ampas tebu juga dibuat untuk peralatan makan seperti sendok, garpu, nampan makanan dan kotak makan yang diklaim lebih aman untuk kesehatan. Sebab, tidak mengandung mikroplastik dan lebih ramah lingkungan karena mudah terurai.

**Sumber : Chinimandi sugarnews.com/Yuk**





# MERAJUT ASA

## KOPERASI DESA

## MERAH PUTIH



Scan untuk mengetahui  
lebih tentang Peraturan  
Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi satu asa bangkitnya perekonomian desa. Pemerintah berharap koperasi ini dapat diluncurkan saat Hari Koperasi, 12 Juli 2025 dan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

**B**agi bangsa Indonesia, kelembagaan koperasi di Indonesia telah diperkenalkan sebelum Indonesia merdeka. Patih R. Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896 mulai membangun koperasi untuk membantu pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang.

Setelah Indonesia Merdeka, pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi mengadakan Kongres pertama di Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Salah tokoh Koperasi Indonesia adalah Wakil Presiden Indonesia pertama, Moh Hatta yang

kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta mengungkapkan tujuan koperasi bukan mencari laba atau untung, tapi untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota koperasi.

Karena itu, Moh. Hatta mengusulkan didirikan 3 jenis koperasi. Pertama, koperasi konsumsi yang melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Saat Orde Baru berkuasa, Presiden Soeharto membangun Koperasi Unit Desa (KUD) untuk membantu petani dan nelayan. Dalam perjalanan, banyak KUD yang tersandung kasus. Bahkan mencuat istilah KUD dengan kepanjangan Ketua Untung Duluan.

Sejak itu banyak yang antipati terhadap lembaga tersebut.

Di tengah kesan miring koperasi, Presiden Prabowo Subianto mencoba membangkitkan kembali kelembagaan bisnis yang bercokol di desa tersebut dengan nama Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2025.

### Pangkas Rantai Pasok

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pembentukan koperasi ini bertujuan memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen. Koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti PT Pos Indonesia dan Bank Himbara yang berfungsi sebagai agen layanan keuangan. "Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, karena ada bank, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak," tegas Zulkifli.

Dalam upaya percepatan, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasional koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafond kredit awal sebesar Rp 3 miliar. "Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafondnya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafond Rp 3 miliar," tegasnya.

Namun Zulkifli mengingatkan, dana tersebut bukanlah hibah, tapi

kredit usaha yang akan dikelola secara profesional. Nantinya koperasi tersebut akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang. "Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu," tambahnya.

Menteri Koperasi, Budi Arie menekankan pentingnya transformasi Kopdes Merah Putih agar benar-benar dapat menjadi entitas atau badan usaha yang produktif, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan ia berharap, Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi lembaga ekonomi yang melayani kebutuhan nyata warga dari dapur rumah tangga hingga urusan kesehatan dan pembiayaan, terutama di desa, bukan hanya sekedar program.

"Kita tidak sedang bicara koperasi sebagai ide, tapi sebagai aksi nyata. Koperasi harus hadir sebagai lembaga yang melayani kebutuhan warga dari sembako murah, pembiayaan terjangkau, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik," kata Budi Arie.

Secara nasional saat ini telah terbentuk 80.480 Kopdes Merah Putih. Sebanyak 93,04 persen atau 74.877 unit Kopdes Merah Putih telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Meski target pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai target, namun Menkop mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Menurutnya, fase pertama yaitu pembentukandanpendiriankoperasi, masih ada fase lanjutan yang perlu mendapat perhatian serius yaitu fase operasionalisasi. Dalam fase ini, pemerintah pusat dan daerah harus dapat memastikan usaha koperasi berjalan secara konkret dan memiliki usaha ekonomi yang produktif, sehat dan dipercaya.

Untuk itu diperlukan penguatan aspek manajerial dan tata kelola yang baik, termasuk digitalisasi koperasi secara menyeluruh. Setidaknya ada tiga aspek penting yang harus dipahami setiap pengelola Kopdes Merah Putih yakni, *People, Organization, System* (POS). Untuk itu aspek penguatan SDM yang kompetitif menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian aspek organisasi yakni koperasi harus memiliki legalitas yang jelas dan tatakelola yang baik.

Wamenkop Ferry Juliantono menambahkan, ada 92 percontohan Kopdes Merah Putih di 38 provinsi yang siap diluncurkan pada 19 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah. Ke-92 percontohan tersebut akan dibiayai empat sumber yaitu, bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Saat ini kata Ferry, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secepatnya dikeluarkan karena menjadi dasar bank-bank Himbara, BPD, dan LPDB, serta KSP, untuk menjadi sumber pembiayaan percontohan ini. Nantinya, ke-92 percontohan Kopdes Merah Putih itu akan menjadi tempat referensi pembelajaran bagi koperasi desa atau kelurahan yang ada di sekitarnya. **Yul**

# Koperasi Desa Merah Putih, Hajatan Besar Kabinet Prabowo

Sejak awal tahun, isu koperasi Merah Putih menjadi sorotan karena skala dan keterlibatan lintas sektor yang sangat besar. Bahkan tidak ada satu pun program yang dikeroyok bersama-sama oleh 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kelurahan. Artinya ini bukan program biasa, ini adalah misi nasional.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen penuh terhadap percepatan program ini. Terlihat dari terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) guna mengakselerasi pembentukan koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Bukan hanya itu, target yang ditetapkan tidak main-main, yaitu seluruh 80.000 koperasi desa merah putih harus terbentuk dan aktif paling lambat 12 Juli 2025. Data Kementerian Koperasi, hingga saat ini sudah terbentuk sekitar 65.000 koperasi yang telah mendapatkan SK pengesahan, atau sekitar 75 persen telah berbadan hukum. Sisanya ditargetkan rampung dan disahkan pada akhir Juni 2025.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Hendra Saragih mengatakan, Presiden Prabowo juga telah menantang bahwa saat ini waktunya membicarakan koperasi. Jika Koperasi Desa Merah Putih ini gagal, maka jangan membicarakan koperasi lagi.

"Pak Presiden telah menetapkan bahwa pembentukan koperasi ini bukan hanya soal jumlah, tapi tentang membangun kekuatan ekonomi dari desa. Kami dibatasi oleh waktu dan target yang jelas. Ini pekerjaan luar biasa," kata Hendra saat Sarasehan Tani di sela-sela Musyawarah Nasional X Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang digelar di Jakarta, Selasa (24/6). Menurut Hendra, proses pembentukan koperasi secara kelembagaan melalui musyawarah desa sudah selesai. Saat ini yang tersisa adalah proses legalisasi badan hukum yang tengah dikebut di seluruh daerah. "Presiden menginginkan adanya koperasi desa di setiap desa dan kelurahan di Indonesia," katanya.

Ada beberapa tujuan pendirian Kopedes Merah Putih ini. Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain

itu, ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Apalagi kondisi dunia sedang bermasalah, sehingga mempengaruhi ekonomi, termasuk Indonesia.

"Presiden menginginkan bahwa kekuatan ekonomi kita dari desa. Jadi kita harus menguatkan desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," katanya. Bahkan Presiden Prabowo dalam arahnya, menekankan pentingnya membangun ekonomi dari desa ke kota, bukan sebaliknya.

Koperasi dipilih sebagai motor penggerak karena memiliki struktur kolektif dan berbasis komunitas. Selain untuk membuka lapangan kerja, koperasi juga diharapkan menjadi sarana pemerataan pendapatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelindung dari gejolak ekonomi global.

Tak hanya menjadi sarana distribusi, koperasi Merah Putih juga ditugaskan sebagai agregator dan akselerator pelaku UMKM desa. Koperasi akan menjadi simpul distribusi bahan pokok, hasil pertanian, serta tempat masyarakat mengakses layanan ekonomi dan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau.

## Pangkas Rantai Pasok

Salah satu masalah besar di sektor pertanian adalah panjangnya rantai pasok yang membuat harga di tingkat konsumen melambung, namun petani sebagai produsen tetap menerima harga rendah. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, Hendra berharap, akan menjadi solusi konkret dalam memangkas rantai distribusi.

"Produk petani tidak perlu lagi melewati lima hingga enam lapisan tengkulak. Dengan koperasi, petani bisa menjual langsung ke koperasi yang notabene milik mereka sendiri. Ini akan menaikkan harga di tingkat petani dan menurunkan harga di tingkat konsumen," jelasnya.

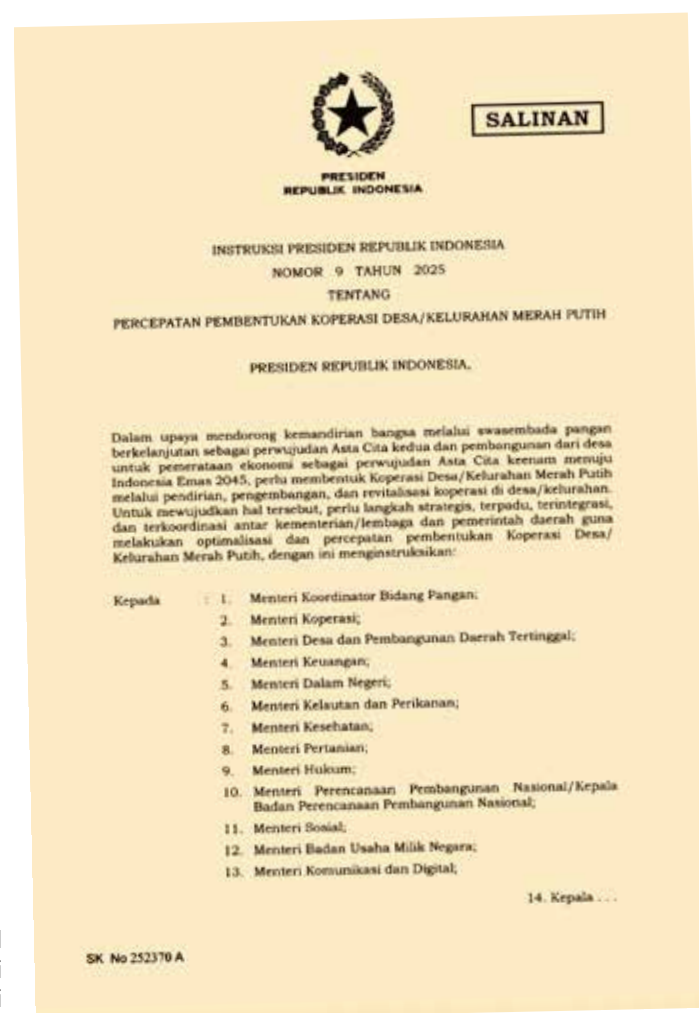
Rantai distribusi yang panjang selama ini menyebabkan margin keuntungan justru dinikmati oleh perantara, bukan produsen. Dengan koperasi, struktur distribusi akan

menjadi lebih efisien dan adil. Koperasi akan bertindak sebagai pembeli langsung dari petani dan sekaligus distributor ke konsumen, sehingga harga di kedua ujung rantai menjadi lebih rasional.

Selain urusan distribusi, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menyediakan layanan terpadu. Di setiap koperasi, masyarakat akan menemukan gerai sembako seperti beras dan LPG, gerai obat murah, klinik desa, unit simpan pinjam, fasilitas pergudangan, serta kantor operasional koperasi. Konsep ini dirancang sebagai pusat ekonomi lokal yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh warga desa.

Menurut Hendra, banyak kelompok tani dan Poktan di berbagai daerah yang sudah aktif dan bisa langsung dimaksimalkan perannya untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah juga memberikan peluang bagi kelompok-kelompok ini untuk bertransformasi menjadi koperasi atau mitra koperasi, terutama untuk penyaluran barang-barang bersubsidi seperti pupuk dan LPG.

"Petani nantinya bisa menjual langsung produknya ke koperasi. Jadi pemilik Koperasi Desa Merah Putih ini adalah petani, karena koperasi ini memang anggotanya adalah masyarakat di desa ataupun masyarakat di kelurahan tersebut. Petani sendiri adalah pemilik koperasi itu sendiri kemudian," tuturnya. Pemerintah ungkap Hendra, membuka kesempatan



kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk bertransformasi menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Jika semua berjalan sesuai rencana, Hendra berharap, peluncuran resmi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat dilakukan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Setelah peluncuran, pemerintah menargetkan seluruh koperasi telah berjalan aktif dan menjalankan unit usahanya paling lambat pada 28 Oktober 2025.

Menteri Koperasi dan UKM sendiri kata Hendra, menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini adalah taruhan besar bagi masa depan koperasi Indonesia. Dengan skala yang sangat besar dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, program koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan kemajuan desa.

Herman/Yul



# Bangkitkan Ekonomi dari Akar Rumput



Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar koperasi biasa. Digagas sebagai jembatan menuju transformasi ekonomi desa yang berakar pada semangat kebersamaan dan kemandirian. KDMP bahkan dijuluki sebagai “kunci sakti” untuk menurunkan Gini Index dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tembus 8 persen.

**K**laim ini bukan datang dari sembarang tokoh, melainkan dari Prof. Dr. Ir. H. Agus Pakpahan, M.S., Guru Besar IPB University sekaligus Rektor Universitas Koperasi Indonesia (Inkopin University). “Kita tidak bisa terus berharap pada *trickle-down effect* dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kenyataannya, pertumbuhan itu sering tidak menyentuh desa,” ujar Prof. Agus.

Selama ini ia menilai, struktur ekonomi nasional masih didominasi konsumsi rumah tangga dan investasi sektor besar, sementara

desa hanya menjadi penonton pasif. Padahal, desa menyimpan potensi ekonomi luar biasa, dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, hingga agroindustri berbasis komunitas. “Di situlah KDMP hadir. Bukan sekadar koperasi, tapi arsitektur ekonomi alternatif yang digerakkan dari bawah, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.

Indonesia telah lama bergumul dengan ketimpangan. Gini Index kita berkisar 0,38, tergolong tinggi untuk negara agraris dengan populasi desa yang dominan. Bagi Prof. Agus, ini adalah panggilan moral sekaligus tantangan akademik. “Kita ingin Gini Index di angka 0,32, itu bukan mimpi kosong. Tapi butuh perubahan struktur ekonomi yang radikal dan koperasi berbasis desa adalah jawabannya,” sebutnya.

Melalui KDMP, ia yakin distribusi nilai tambah tak lagi hanya dinikmati tengkulak atau korporasi besar. Petani mendapatkan haknya secara utuh mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. “Kita ubah paradigma ekonomi desa dari subsisten menjadi surplus. Dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan,” tegasnya.

## Substitusi Impor Pangan

Salah satu misi KDMP adalah menurunkan ketergantungan pada impor pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Indonesia masih mengimpor lebih dari 30% kebutuhan bawang putih, 50% kedelai, dan sebagian besar daging sapi dari luar negeri. Ketergantungan ini bukan hanya

membahayakan ketahanan pangan, tapi juga melemahkan daya tawar petani lokal.

“Kita harus jujur, impor itu candu. Ia membuat kita nyaman dengan solusi instan, padahal petani kita bisa memproduksi jika diberi sarana, akses pasar, dan harga yang adil,” tegas Prof. Agus.

KDMP didesain untuk mengambil alih fungsi strategis ini. Lewat klaster produksi terintegrasi di desa, setiap KDMP akan fokus pada komoditas tertentu, misalnya bawang merah di Brebes, kedelai di Grobogan, atau kambing dan sapi di NTB. Dengan manajemen koperasi yang profesional, efisien, dan berbasis teknologi, desa bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Ini bukan sekadar bisnis. Ini perjuangan. KDMP adalah tameng ekonomi bangsa,” ujarnya.

Selama ini, menurutnya, petani kecil tak berdaya menghadapi rantai pasok yang panjang dan tak ramah. Harga di tingkat produsen ditekan serendah mungkin, sementara harga di pasar membubung tinggi. KDMP hadir sebagai penghubung yang adil dan beretika.

Di dalam ekosistem KDMP, setiap unit memiliki fungsi spesifik. Produksi dipegang petani anggota koperasi, pengolahan dijalankan BUMDes mitra, distribusi ditangani unit logistik koperasi, dan pemasaran berbasis digital melalui aplikasi e-commerce desa. “Bayangkan jika petani bisa mengirim produk langsung ke konsumen di kota besar tanpa lewat tengkulak. Itulah revolusi distribusi yang kita bangun,” kata Prof. Agus.

## Uji Coba Lapangan

Agus menjelaskan, KDMP bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan lembaga sosial yang berbasis nilai. Keuntungan koperasi tidak dibagikan secara individu, melainkan diinvestasikan kembali untuk infrastruktur desa, sekolah pertanian rakyat, pelatihan kewirausahaan, dan teknologi pertanian.

“Setiap rupiah yang dihasilkan KDMP akan kembali ke desa, bukan mengalir ke kota atau luar negeri. Di sinilah letak ideologi ekonomi kita,” ucapnya. KDMP lanjut Agus, juga akan membuka akses permodalan dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan bank syariah dan fintech koperasi. Tidak ada jaminan rumah atau tanah, menurutnya, cukup keanggotaan dan rekam jejak usaha.

Beberapa prototipe KDMP saat ini telah diuji coba di beberapa wilayah seperti Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur), Tanah Datar (Sumatera Barat), dan Temanggung (Jawa Tengah). Hasilnya cukup menggembirakan. Bahkan di Temanggung, koperasi yang beranggotakan 300 petani tembakau berhasil mengonversi sebagian lahan menjadi hortikultura organik yang langsung diserap pasar retail modern.

Di Tanah Datar, KDMP menjembatani peternak kecil dengan pembeli daging sapi premium di Jakarta melalui sistem pre-order dan smart logistics. “Kami belajar dari lapangan, bukan hanya dari teori. Dan yang kami lihat, KDMP bisa menjadi lokomotif perubahan,” ujar Prof. Agus.

Meskipun potensinya besar, KDMP juga menghadapi sejumlah tantangan klasik. Misalnya, birokrasi yang lamban, ego sektoral antarinstansi, serta resistensi dari pelaku pasar lama. Karena itu, Agus menegaskan, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pusat dan daerah. Jadi, perlu insentif fiskal untuk koperasi produktif, serta deregulasi agar desa bisa bergerak lincah.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan ekonomi bagi warga desa, agar mereka memahami konsep koperasi modern yang transparan dan akuntabel. Bagi Agus, desa bukan hanya halaman belakang republik ini. Ia adalah halaman depan, tempat masa depan negeri ini. Ditulis dengan tangan para petani, nelayan, dan pemuda desa. KDMP adalah pena yang akan menulis ulang sejarah ekonomi Indonesia. **Gsh/Yul**





# Transformasi Penyuluh Pertanian



Puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 Tahun 2025 menjadi momentum penting pengakuan terhadap peran strategis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menopang transformasi sektor pertanian dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Sesuai amanah Inpres No. 3 Tahun 2025, mulai tahun 2026, penyuluh pertanian akan menjadi pegawai pusat.

Hingga kini pemerintah telah siap menarik 34 ribu dari 38 ribu penyuluh pertanian yang di daerah ke pusat. Saat ini penyuluh pertanian ada yang sudah ASN, namun demikian ada juga masih PPPK dan THL-TBPP baik pusat maupun daerah. Namun untuk THL-TBPP yang direkrut pemerintah daerah sepenuhnya diserahkan pihak daerah.

"Penarikan penyuluh ini sifatnya madatori. Jadi semuanya secara otomatis akan ditarik dan menjadi kewenangan pusat," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti.

Santi, sapaan akrab Kepala BPPSDMP ini bahwa penguatan peran penyuluh

merupakan bagian dari langkah serius pemerintah dalam mereformasi sistem penyuluhan. Selama masa transisi ini, pemerintah tengah menyiapkan seluruh proses. Namun mulai tahun 2026, seluruh penyuluh akan resmi menjadi pegawai pusat.

Meski status berubah, para penyuluh tetap bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah masing-masing. Apalagi dalam Inpres No. 3 Tahun 2025 menyebutkan fungsi penyuluh pertanian tidak boleh dialihkan oleh pemerintah daerah. "Posisi penyuluh nanti tetap berada di daerah dan mereka tetap bekerja di BPP masing-masing," katanya.

Dengan status ini, penyuluh dapat diberdayakan lebih optimal untuk mendampingi petani dan mempercepat swasembada pangan. "Percepatan swasembada pangan juga harus diiringi peningkatan produktivitas petani. Penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan varietas unggul, dan penerapan teknologi pertanian modern," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementan, Tedy Dirhamsyah menegaskan penarikan ke pusat hanya berlaku untuk ASN, yakni PNS dan PPPK. Sementara penyuluh berstatus THL-TBPP tetap diperpanjang kontraknya pada tahun 2026 dan akan menjadi prioritas pengangkatan PPPK melalui formasi yang dibuka oleh Kementan.

Terkait kelembagaan, Tedy menyatakan, struktur kelembagaan penyuluhan pertanian akan ditata ulang. Di tingkat provinsi akan dibentuk UPT atau Koordinator Penyuluhan (Korluh) di bawah BRMP (Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian). Di tingkat kabupaten akan dibentuk Koordinator Jabatan Fungsional (KJF) yang akan berkantor di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terdekat. Sementara di tingkat kecamatan, keberadaan BPP tetap dipertahankan. **Yul**



# Penyuluh Pertanian dalam Sorotan Pakar

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pertanian Nasional menjadi tonggak penting dalam upaya membenahi sistem penyuluhan pertanian Indonesia. Namun, pelaksanaannya tak lepas dari tantangan berat, terutama dalam ketenagakerjaan, khususnya pengalihan penyuluh pertanian dari pegawai daerah menjadi pusat.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia), Mulyono Machmur menilai, sistem penyuluhan yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menjawab tantangan baru. "Jika satu subsistem terganggu, maka yang lain tidak akan jalan," ujarnya saat FGD Transformasi Penyuluh Pertanian di Jakarta, Selasa (25/6).

Mulyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penyuluh Pertanian ini mencontohkan, saat UU Otonomi Daerah berlaku, ketika penyuluh perikanan ditarik ke pusat dan kehutanan ke provinsi, justru penyuluh pertanian di daerah harus menanggung beban ganda, khususnya dalam menangani pekerjaan dinas. Akhirnya, penyuluh pertanian tak hanya menjalankan tugas edukasi teknis kepada petani, tetapi juga terjebak dalam beban administrasi di bawah dinas daerah.

Padahal dinas pertanian daerah, hanya berperan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelayanan, bukan pada fungsi penyuluhan. Akibatnya, penyuluh lebih banyak mengerjakan fungsi administratif. "Sementara fungsi utama sebagai agen perubahan di lapangan justru ditinggalkan," sesalnya.

Seharusnya menurut Mulyono, penyuluh di tingkat kabupaten dan kota, bertugas menyusun Program Penyuluhan yang bersumber dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Program itu sintesis antara program pemerintah dan kebutuhan petani. "Jadi harusnya program yang ada di daerah itu naik dari bawah ke atas, bukan sebaliknya," tegasnya.

Dampak dari kebijakan Otonomi Daerah, penyuluh di tingkat kabupaten selain dituntut melaksanakan penyuluhan, juga harus menjalankan manajemen dan administrasi penyuluhan, membina kelembagaan petani, serta melakukan supervisi dan pengembangan kapasitas penyuluh. Padahal di sisi lain, jumlah penyuluh di lapangan juga sangat terbatas.

Nah, keterbatasan jumlah

tenaga penyuluh itu menjadi masalah serius. Dulu, satu BPP bisa memiliki enam penyuluh dengan spesialisasi berbeda. Mulai dari yang menangani pertanian, peternakan, sampai teknologi pertanian. Kini, yang terjadi jumlah penyuluh pertanian kian menyusut drastis. "Sekarang rata-rata hanya ada dua orang koordinator dan supervisor," ujarnya.

Padahal ungkap Mulyono, satu Wilayah Kerja BPP (WKBPP) identik dengan satu kecamatan yang mencakup sekitar 3.000 hektar lahan sawah atau kebun. Di bawahnya, terdapat tiga Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan masing-masing 1.000 hektar. Kemudian, di tingkat desa terdapat Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dengan rata-rata 350 hektar.

"Dengan konfigurasi itu, kebutuhan penyuluh yang memadai menjadi sangat krusial,"



kata Mulyono yang kini menjadi Pemimpin Perusahaan PT. Duta Karya Swasta penerbit Tabloid Sinar Tani, satu-satunya media mainstream pertanian yang selama ini memberikan informasi ke penyuluh seluruh Indonesia.

## Kualitas Penyuluh Pertanian

Lebih lanjut, Mulyono menyoroti kualitas penyuluh saat ini yang belum sepenuhnya memadai. Seharusnya, syarat minimal seorang penyuluh adalah menguasai teknis pertanian, bisa mengajar, paham sosiologi pedesaan dan tinggal di wilayah kerja. "Tidak kalah penting adalah pernah ikut latihan dasar penyuluh. Tapi kenyataannya

banyak penyuluh belum pernah ikut pelatihan dasar," ujarnya.

Ia menilai, tanpa pelatihan dasar, ruh penyuluhan tidak akan hidup. Mirisnya, penyuluh hanya akan menjadi pelaksana teknis biasa. Padahal di tingkat desa atau Posluhdes, penyuluh pertanian diharapkan mampu menyusun rencana kerja penyuluhan, melakukan inventarisasi masalah, memberikan layanan informasi, mengembangkan kepemimpinan petani, serta memfasilitasi kegiatan kelembagaan lokal. "Di titik inilah sinergi antara penyuluh ASN, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta menjadi kunci keberhasilan," katanya.

Untuk itu, Mulyono menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas penyuluh tidak hanya memiliki *hard skill*, tetapi juga *soft skill*. Jadi, penyuluh itu bukan hanya pintar teknis, tapi juga memiliki etika, emosi yang stabil, integritas, motivasi, kreativitas, intuisi, sampai kemampuan komunikasi. "Itu semua bagian dari *soft skill* yang mutlak diperlukan," tegasnya.

Karenanya, ia mengingatkan, generasi milenial penyuluh pertanian di masa depan harus memiliki talenta yang lengkap yakni, cepat, percaya diri, cerdas, mampu berbahasa, serta pandai mendengar. "Kalau tidak begitu, penyuluh akan kalah cepat dari dinamika di lapangan," tegasnya. **Herman/Yul**

## 3 Jalur Pendekatan



Setidaknya ada tiga jalur pendekatan dalam penyuluhan pertanian yakni, jalur cepat, sedang, dan lambat. Jalur cepat melalui proyek pemerintah dan pendekatan kekuasaan. Jalur sedang menekankan perubahan perilaku petani agar tahu, mau, dan mampu. Sedangkan jalur lambat bertujuan membangun motivasi, potensi lokal, hingga munculnya wirausahawan petani.

"Tinggal pilih mau pakai pendekatan mana," kata Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Penyuluh Pertanian, Mulyono Machmur. Untuk itu perlu memperhatikan kondisi objektif petani. Saat ini ada sekitar 25 persen petani di

Indonesia yang tradisional, bahkan 20 persen lainnya masih nomaden.

Mantan Kepala Pusat Penyuluhan ini melihat paradigma baru penyuluh pertanian terdiri dari beberapa hal mulai dari jasa informasi, lokalita, teknologi agribisnis, pendekatan kelompok, fokus pada kepentingan petani, profesionalisme hingga dapat memuaskan petani. Karena itu, perlu gerakan bersama yang melibatkan pemimpin formal maupun informal untuk membentuk sistem penyuluhan pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

**Herman/Yul**



# ‘Rumah’ Penyuluh Pertanian Pasca Inpres

Pemerintah terus memperkuat sistem pertanian nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian. Inpres ini menandai dimulainya gerakan penyuluh pertanian nasional sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.

**B**erlakunya UU Otonomi Daerah, penyuluh pertanian yang semula adalah pegawai pemerintah pusat menjadi pegawai pemerintah daerah. Penarikan tersebut berimbas pada kelembagaan penyuluh pertanian yakni, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) yang selama ini menjadi ‘rumah’ penyuluh di daerah yang akhirnya bubar. Dinas Pertanian kemudian menjadi ‘rumah’ baru penyuluh pertanian.

Kini melalui Inpres No. 3 Tahun 2025, pemerintah mengembalikan penyuluh pertanian daerah ke pusat. Penyuluh harus meninggalkan Kantor Dinas Pertanian dan kembali ke rumah besar di Kementerian Pertanian. Jika sebelumnya ada Bakorluh daerah yang menaungi penyuluh pertanian, bagaimana pasca Inpres nanti?

Anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) sekaligus dosen Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Momon Rusmono menganggap, kelembagaan bukan hanya soal struktur birokrasi, tetapi merupakan wadah penting untuk pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pusat informasi bagi petani dan penyuluh. Keberadaan kelembagaan penyuluhan merupakan syarat mutlak dalam membangun sistem penyuluhan yang efektif.

“Kalau kita ingin swasembada pangan yang berkelanjutan, maka kelembagaan penyuluhan tidak bisa ditawar. Ia harus ada dari tingkat pusat sampai desa. Ini menyangkut arah, semangat, dan keberlanjutan sistem pertanian kita,” ujar Momon

dalam FGD Transformasi Penyuluh Pertanian di Jakarta, Selasa (25/6).

Keberadaan kelembagaan penyuluhan menurutnya, memiliki berbagai manfaat nyata, antara lain memperpendek *span of control* atau rentang kendali terhadap penyuluh di lapangan. Dengan adanya kelembagaan di tingkat desa dan kecamatan, pengawasan dan pembinaan bisa dilakukan secara lebih langsung dan efisien.

“Penyuluh butuh tempat untuk berinovasi, berkeaktifan, dan berorganisasi. Kelembagaan ini memberi ruang bagi mereka, membangun kepercayaan diri dan menjadi pusat semangat, bukan hanya bagi penyuluh tapi juga petani,” tambahnya.

Secara hukum, fondasi kelembagaan penyuluhan sangat kuat. Momon menguraikan setidaknya ada empat peraturan utama yang menjadi dasar keberadaannya. Pertama, Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya pasal 8 hingga pasal 18, yang secara eksplisit mengatur kelembagaan penyuluhan baik pemerintah, swasta, maupun swadaya.

Kedua, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan bahwa lembaga penyuluhan dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengatur struktur kelembagaan mulai dari pusat hingga kecamatan.



Sementara Perpres No. 35 Tahun 2022 memperkuat peran kelembagaan dalam pengembangan kompetensi penyuluh, terutama pada pasal 10 hingga 13 yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa.

## Bentuk Balai Besar

Dengan landasan regulasi tersebut, Momon mengusulkan bentuk kelembagaan penyuluhan yang ideal di semua level. Untuk tingkat pusat, kelembagaan tetap berada di bawah Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Di tingkat provinsi, perlu dibentuk Balai Besar Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pertanian (BBPIP) setara eselon II. “Balai ini akan mengemban tugas dalam penyediaan materi penyuluhan yang standar dan terverifikasi,” katanya.

Kemudian, Momon menyarankan, dengan ditariknya penyuluh pertanian ke pusat, ke depan perlu adanya pelayanan informasi pertanian untuk menggantikan Balai Informasi Pertanian yang saat ini sudah hilang. BBPIP ini nanti bertugas mengumpulkan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan materi penyuluhan berbasis data dan kebutuhan daerah. “Dulu kita punya Balai Informasi Pertanian, sekarang tidak ada. Akhirnya penyuluhan berjalan tanpa arah sehingga melakukan penyuluhan dasarnya google tidak ada materi penyuluhan yang disiapkan oleh kelembagaan. Jadi saya minta fungsi informasi penyuluhan itu di hidupkan lagi,” tegasnya.

Tugas lain BBPIP ini yaitu merumuskan kebijakan dan program penyuluhan provinsi, fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan, serta kelembagaan petani dan KEP, melaksanakan Kerjasama (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas) penyuluhan pertanian tingkat provinsi. Selain itu juga melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan



pertanian, dan membangun dan mengembangkan pangkalan data dan jaringan informasi penyuluhan pertanian tingkat provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, Momon mengusulkan dibentuknya Balai Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Pertanian yang fokus pada penyuluhan berbasis lokalitas. Sedangkan di tingkat kecamatan, kelembagaan tetap diperkuat melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai ujung tombak operasional penyuluhan.

Namun, ia menekankan bahwa pembentukan kelembagaan harus mempertimbangkan kondisi daerah. Tidak semua kabupaten/kota harus memiliki kelembagaan dengan jumlah dan bentuk yang sama. Faktor seperti jumlah BPP, jumlah penyuluh, dan luas lahan pertanian menjadi penentu kebutuhan kelembagaan.

“Fleksibel saja. Kalau satu kabupaten hanya punya sedikit penyuluh, kelembagaannya bisa digabung atau disesuaikan. Seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, yang jumlah penyuluhnya sangat terbatas, bahkan tersisa hanya enam orang” ungkapnya.

Dengan penguatan kelembagaan yang terstruktur, adaptif, dan berbasis kebutuhan daerah, sistem penyuluhan pertanian nasional diyakini dapat lebih responsif dan berkelanjutan. Tak hanya mendukung petani, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan pertanian yang mandiri dan berdaya saing.

**Herman/Yul**



# Percepat Transformasi Penyuluh Pertanian

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mempercepat transformasi sistem penyuluhan pertanian. Salah satu langkah strategis yang kini sedang berjalan adalah penarikan kelembagaan penyuluh dari daerah ke pusat sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025.

Hari Krida Pertanian 2025 yang digelar di Kementerian Pertanian pada Senin (23/6) menjadi momentum transformasi penyuluh pertanian. Mengusung tema "Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Mendukung Swasembada Pangan Nasional", peringatan HKP ke-53 ini dihadiri berbagai kalangan.

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2025, Pemerintah mengalihkan status ASN penyuluh dari pemerintah daerah ke pusat. Bagi Darma Irawan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, peringatan Hari Krida Pertanian ke 53 menekankan pentingnya transformasi penyuluh agar tetap relevan dan berdampak.

Dengan ditariknya penyuluh pertanian ke pusat, menurutnya, penyuluh pertanian harus aktif mendukung langkah-langkah strategis pemerintah, utamanya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Penyuluh tidak hanya sebagai pendamping petani, tetapi juga sebagai agen perubahan di lapangan.

"Harapan kami, penyuluh harus bertransformasi menjadi penyuluh yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena kami adalah ujung tombak untuk mewujudkan swasembada pangan, cita-cita besar Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto," ujar Dharma.

Sementara itu, Abbah Attamimi, PPL Kalimantan Tengah mengatakan, semangat para penyuluh pada peringatan Krida ke 53 ini menjadi refleksi nyata bahwa transformasi sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada kebijakan pusat, tetapi juga pada daya juang di lapangan. Dengan

Selama ini, ia menilai, posisi penyuluh yang berada di bawah kendali pemerintah daerah kerap menimbulkan ketidakefisienan. Kondisi kelembagaan penyuluhan yang tidak seragam membuat pelaksanaan program dari pusat menjadi sulit diintegrasikan dengan kegiatan di lapangan.

"Dulu fokus penyuluh ada pada yang mengangkat, dalam hal ini pemerintah daerah. Ketika pusat menggelontorkan program, seringkali tidak bisa sinkron. Tapi ke depan, penyuluh adalah pegawai Kementerian Pertanian. Ini akan lebih efisien, lebih solid," ujarnya.

Penguatan kelembagaan penyuluhan, menurut Sam, akan dilakukan secara menyeluruh dari provinsi hingga ke level kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan akan menjadi

BPP di daerah telah dialihfungsikan menjadi mushola, kantor atau fasilitas lain. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 secara tegas melarang hal ini.

"Saya prihatin karena banyak penyuluh yang mengatakan tidak punya 'rumah'. Banyak BPP yang sudah diubah fungsinya. Maka dari itu, di Inpres yang baru, sudah disebutkan secara eksplisit bahwa BPP tidak boleh dialihfungsikan," tegas Sam.

Ia bahkan mengaku telah meminta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) untuk menyusun ulang desain kelembagaan BPP, termasuk merancang prototipe BPP ideal yang bisa diterapkan secara nasional. "Kita sudah punya rumahnya. Sekarang tugas kita mengisi rumah itu baik secara fisik, program, maupun dari sisi sumber daya manusianya," tambahnya.

Dengan adanya penyatuan penyuluh ke pusat, sistem pengukuran kinerja juga menjadi lebih terstandarisasi. Setiap penyuluh kini memiliki indikator kerja atau Key Performance Indicators (KPI) yang jelas dan bisa dipantau secara harian.

Dengan sistem yang seragam ini, penyuluh akan lebih mudah dalam mengikuti pelatihan, promosi, dan penugasan.



sinergi dan kolaborasi, swasembada pangan bukanlah cita-cita semata, melainkan target nyata yang sedang digerakkan bersama.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi dedikasi para penyuluh dan Babinsa yang terus mendampingi petani di lapangan. Ia menegaskan, HKP tahun ini menjadi momentum penguatan peran penyuluh sebagai pengawas langsung program pertanian dari proses tanam, distribusi pupuk dan alsintan, hingga adopsi benih unggul dan teknologi pertanian modern.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian menegaskan, proses transformasi penyuluh pertanian sudah berlangsung secara bertahap dan relatif tanpa kendala berarti. "Proses transisi sudah berjalan dan tidak ada masalah. Justru ini membuat program-program dari pusat dapat dijalankan secara seragam di seluruh Indonesia," kata Sam saat FGD Transformasi Penyuluh Pertanian di Jakarta, Selasa (25/6).

pusat aktivitas dan ujung tombak dari sistem penyuluhan yang baru. "Kita perkuat semua lini, tapi khususnya BPP sebagai garda terdepan. Termasuk 'amunisinya' juga harus kuat, mulai dari sarana, SDM, dan fasilitas lapangan," tegasnya.

## Penataan Kelembagaan

Sebagai contoh, Menteri Pertanian telah mulai mendistribusikan motor operasional bagi penyuluh untuk memudahkan mobilitas mereka di lapangan. Lebih dari itu, pemerintah tengah merancang BPP ideal yang meniru konsep yang diterapkan di Jepang.

"Saya membayangkan BPP kita seperti di Jepang. Di sana, semua informasi, teknologi, dan layanan pertanian terpusat di satu tempat. Kita ingin seperti itu, tinggal kita sesuaikan dengan kondisi lokal," tutur Sam.

Salah satu perhatian utama dalam penataan kelembagaan penyuluhan adalah keberadaan fisik BPP itu sendiri. Dalam beberapa kasus,

Pemerintah menargetkan penataan kelembagaan ini selesai pada tahun 2025 agar di tahun berikutnya bisa dilakukan percepatan program strategis salah satunya swasembada pangan.

Namun demikian, Sam mengingatkan, penyuluh yang kini menjadi pegawai pusat tetap harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Sebab, bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat lokal yang memahami kebutuhan spesifik wilayahnya.

"Penyuluh adalah orang daerah, jadi harus tetap ikut program daerah. Penarikan ke pusat tidak berarti mereka lepas dari daerah. Justru sinergi ini yang akan jadi kekuatan," ujarnya menegaskan.

Dengan kelembagaan yang kuat, peran penyuluhan akan kembali menjadi motor penggerak pertanian nasional. Berbagai insentif dan kebijakan tengah disiapkan untuk memastikan penyuluh dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. **Herman/Yul**



# Penyuluh Pertanian, Penggerak Senyap di Balik Koperasi Merah Putih

Ketika pemerintah men-canangkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai gerakan nasional, banyak yang bertanya: siapa yang akan menjadi penggerak di lapangan? Siapa yang akan memastikan program ambisius ini tidak berhenti di tataran konsep dan papan nama? Jawabannya sederhana namun krusial: penyuluh pertanian.

Ya, penyuluh pertanian. Profesi yang kerap luput dari sorotan, padahal mereka berdiri paling depan dalam setiap denyut kehidupan desa. Di balik panen padi yang sukses, di balik kebun hortikultura yang produktif, dan di balik UMKM berbasis hasil tani yang berkembang—ada tangan dingin penyuluh yang bekerja senyap tapi berdampak.

Kini, dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, peran mereka bukan hanya penting, tapi esensial.

Koperasi Merah Putih bukan sekadar koperasi simpan-pinjam. Ia dirancang sebagai ekosistem ekonomi desa yang utuh, menghubungkan petani dengan akses keuangan syariah, menjamin distribusi hasil panen, menyediakan logistik, gudang dingin, sembako murah, hingga layanan kesehatan.

Namun semua ini hanya akan hidup jika ada yang bisa menerjemahkan konsep ke dalam aksi nyata di desa. Di sinilah penyuluh pertanian mengambil peran. Mereka menjadi:

## Pendidik Petani soal Koperasi

Bagi banyak petani, koperasi masih asing atau bahkan identik dengan trauma masa lalu. Penyuluh hadir sebagai penerang. Mereka menjelaskan fungsi koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta bagaimana petani bisa mengambil manfaat secara kolektif—dari pupuk hingga akses pasar.

## Pendamping Teknis dan Mitra Usaha

Penyuluh tidak hanya mendampingi petani di sawah, tapi juga menghubungkan produksi dengan koperasi. Mereka menyusun kalender tanam bersama koperasi, memastikan ketersediaan sarana produksi, bahkan membantu memasarkan hasil tani secara kolektif agar tidak lagi terjebak tengkulak.

## Arsitek Kelembagaan Petani

Penyuluh memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan Gapoktan yang nantinya menjadi tulang punggung koperasi. Mereka membantu menyusun struktur organisasi koperasi, pelatihan dasar manajemen, hingga regenerasi kepemimpinan berbasis desa.

## Jembatan Menuju Permodalan dan Pasar

Siapa yang bisa memberikan data akurat soal kebutuhan pupuk, luas lahan, dan hasil panen? Penyuluh. Dengan data inilah koperasi bisa menyusun rencana usaha, mengakses pembiayaan KUR, dan menjalin kemitraan dengan pembeli besar (*off-taker*) seperti BUMN pangan.

## Penggerak Digitalisasi dan Teknologi Pertanian

Penyuluh juga menjadi pelatih digital desa. Mereka membimbing petani menggunakan aplikasi koperasi Merah Putih, mengenalkan teknologi pertanian modern seperti drone semprot, dan mengawal agar digitalisasi tidak sekadar jargon.

Oleh

Warsana, SP.M.Si.,MP.

Penyuluh Pertanian Ahli Utama di BRMP Jawa Tengah

## Pengawas Lapangan dan Pelapor Kemajuan

Tanpa pemantauan, koperasi bisa kehilangan arah. Penyuluh menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Mereka melaporkan efektivitas layanan koperasi, kendala yang dihadapi, dan memberikan umpan balik kepada Dinas terkait dan Satgas Koperasi Merah Putih.

## Lebih dari Sekadar Pendamping: Penyuluh adalah Motor Perubahan

Kita sering membayangkan perubahan ekonomi desa terjadi lewat bantuan modal atau pembangunan fisik. Tapi pengalaman membuktikan: manusia adalah kunci. Dan penyuluh pertanian adalah manusia-manusia yang selama ini dengan sabar menanam benih perubahan di desa.

Koperasi Merah Putih bisa menjadi *game-changer* ekonomi nasional—jika

kita memperkuat peran dan kapasitas penyuluh. Beri mereka pelatihan tambahan, akses digital, tunjangan memadai, dan penghargaan yang pantas. Karena di pundak merekalah masa depan desa digerakkan.

Mereka bukan sekadar penghubung antara sawah dan pasar. Mereka adalah penggerak antara harapan dan kenyataan.

## Koperasi Merah Putih Akan Hidup Bila Penyuluh Didengar

Jika negara sungguh-sungguh ingin menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pondasi ekonomi nasional dari akar rumput, maka tidak ada jalan lain: dengarkan penyuluh, libatkan penyuluh, dan percayai penyuluh. Mereka mengenal medan, memahami budaya lokal, dan telah lama berdiri bersama petani, bahkan saat tidak ada program pemerintah pun.

Koperasi Merah Putih bisa saja dirancang dari Jakarta. Tapi ia akan tumbuh, berkembang, dan berhasil hanya jika digerakkan dari desa, bersama penyuluh pertanian di garis depan.



# Koperasi Merah Putih

Dengan mengusung nama heroik, Merah-Putih (MP), nuansa koperasi yang sedang dibangun di pedesaan ini terasa sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi berbasis desa/kelurahan, yang dibentuk oleh pemerintah ini diharapkan menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan, inklusivitas ekonomi, dan kemandirian desa.

Koperasi ini dirancang sebagai lembaga usaha multifungsi, meliputi unit usaha simpan-pinjam (terutama syariah tanpa riba), gerai sembako dan klinik/apotik desa, gudang/logistik pasar, *marketplace digital* dan layanan PPOB serta Inkubator UMKM lokal.

Tentu saja perlu kemampuan pengurusnya yang mumpuni agar koperasi berjalan berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja lokal, memberikan akses keuangan inklusif, memperpendek rantai pasok

& tekan harga di tingkat konsumen, memberdayakan petani & UMKM melalui kolektifisasi, meminimalkan peran tengkulak, rentenir, dan pinjol, serta menguatkan pertumbuhan ekonomi desa dan nasional.

Ini sasaran ideal. Di lapangan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh tangan profesional. Pengurus harus kreatif membangun jaringan bisnis dengan unit usaha di sekitarnya. Ini bukan umumnya koperasi yang dibangun oleh sekelompok kecil masyarakat *grassroot* atas dasar kepentingan bersama, yang secara bertahap berhasil menjadi entitas bisnis besar. Ini adalah bangunan yang dirancang oleh pemerintah dengan dukungan penuh dan terkait dengan program strategis.

Koperasi MP wajib berbadan hukum (akta notaris), bisa berupa pendirian koperasi baru, transformasi koperasi lama, atau revitalisasi koperasi tak aktif. Regulasi pendukung mencakup Inpres No. 9/2025, Permendes PDTT, Permenkop UKM, dan UU Perkoperasian.

Target 70.000–80.000 unit koperasi tersebar di seluruh desa/kelurahan Indonesia. Modal awal APBN/APBD: Rp 3–5 miliar per desa (atau aset total Rp 350 triliun). Pendampingan dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, BUMN/BUMD, dan LSM.

Harapan besar disandarkan kepada koperasi MP agar berperan dan mampu menurunkan Gini Ratio nasional dari 0,38 ke 0,25, mendorong pertumbuhan desa hingga 8% per tahun, memperkuat ketahanan pangan dan substitusi impor. Masyarakat dan desa memperoleh manfaat, akses terhadap kredit murah dan aman, bebas riba, harga adil & pemasaran langsung meminimalkan tengkulak dan rantai pasok panjang. Ketersediaan bahan pokok, klinik, layanan digital terjangkau, Penguatan SDM desa, pelatihan manajemen, digital, dan keuangan, terjadi kolaborasi antar desa & integrasi teknologi, dan ekonomi skala luas.

Tantangan dan Kritik biasa

Oleh: Memed Gunawan

terjadi. Sistem sentralisasi dapat meluruhkan kemajemukan jenis usaha yang berdiri atas dasar kekeluargaan, oleh karena itu butuh pengawasan tata kelola dan akuntabilitas transparan.

Dengan target 80 ribu unit koperasi, modal besar, dukungan digital dan regulasi, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa, mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM, memperkuat ketahanan pangan dan pertumbuhan desa. Namun, perlu dijaga agar tata kelola lokal tetap otonom, inklusif. Momok terbesarnya adalah klasik, yaitu transparansi, manajemen terbuka dan kejujuran para pelaksana dan pihak terkait.





# Belajar Koperasi dari Adat Dayak



Di tengah dominasi pendekatan pembangunan yang menunggu intervensi pusat, masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, membalik logika tersebut. Mereka tidak menunggu, mereka bergerak. Credit Union Keling Kumang (CUKK) hadir bukan sekadar sebagai koperasi simpan pinjam, melainkan sebagai pusat gravitasi baru pembangunan endogen berbasis komunitas dan adat.

CUKK didirikan pada 25 Maret 1993 di sebuah kampung bernama Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Inisiator CUKK adalah Munaldus yang merasa prihatin terhadap nasib masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Sebagai anak muda, Munaldus pikir, credit union ini berfungsi sebagai penyanggah dana dan alat pengorganisasian untuk mempertahankan tanah dari rampasan perkebunan kelapa sawit dan sarana belajar.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhir CUKK berdiri. Pada 20 April 2011, akhirnya CUKK memiliki Badan Hukum Provinsi dengan No. 50a/BH/X/1995 Kabupaten Sanggau dan SK Kemenkumham Badan Hukum Nasional AHU-0001183.AH.01.39 tahun 2023. CUKK berdiri karena keprihatinan atas isu-isu kemiskinan, ketidakadilan, perampasan tanah, kerusakan lingkungan, kurangnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan kaum marjinal.

Dalam teori ekonomi regional, model pertumbuhan endogen menggarisbawahi pentingnya sumber daya lokal yakni modal manusia, kapasitas kelembagaan, dan kreativitas komunitas. Semuanya sebagai penggerak utama kemajuan. CUKK adalah perwujudan nyata dari prinsip tersebut, dengan ciri khas yang tak tergantikan. Ia tumbuh dari dalam, dipandu oleh nilai-nilai adat Dayak yang menyatu dalam kehidupan masyarakat.

## Lebih dari Sekadar Koperasi

CUKK saat ini menaungi lebih dari 230.000 anggota dengan aset melampaui Rp 2,2 triliun. Seluruhnya dikelola secara digital dan transparan. Namun kekuatannya jauh melampaui angka. Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK): menjawab kebutuhan pendidikan tinggi berbasis lokal dan kontekstual.



Kemudian ada KK Mart sebagai toko komunitas dengan lebih dari 20.000 item produk, sehingga mendorong ekonomi rakyat yang tidak bergantung pada ritel besar. Ada juga Agrowisata Desa yang mengintegrasikan lingkungan, budaya, dan ekonomi dalam satu ekosistem berkelanjutan. Semua ini dijalankan, dimiliki, dan diperjuangkan masyarakat lokal. Bukan investor eksternal, bukan konglomerat, bukan kebijakan pusat. Keberadaan CUKK menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang mengakar kuat. Dampaknya mengurangi ketergantungan pada rentenir dan lembaga informal. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Adanya CUKK menumbuhkan wirausaha lokal dengan keberanian menghadapi pasar tanpa harus tunduk pada kapital besar. Selain itu, menciptakan ruang partisipasi yang demokratis dan menghadirkan kembali struktur sosial-komunitas. Dalam istilah ekonomi, ini adalah fondasi regional resilience yakni, ketahanan wilayah terhadap tekanan eksternal dan volatilitas global.

Dengan pendekatan seperti CUKK, regenerasi ekonomi desa

bisa terjadi tanpa harus menunggu 'turun tangan' pusat. Institut lokal seperti ITKK bisa melahirkan *brain circulation*. Anak muda kembali membangun tanah kelahiran, bukan meninggalkan. Proses ini bisa mempercepat convergence atau mengejar kemajuan oleh daerah tertinggal, dengan kekuatan sendiri, bukan belas kasih anggaran pusat.

CUKK mengajarkan pembangunan tak harus bersumber dari perintah, melainkan dari partisipasi, kepercayaan, dan kelembagaan yang tumbuh dari akar rumput. Ia membalikkan paradigma kebijakan tidak memaksa masyarakat beradaptasi, tapi belajar dari mereka. Sintang, di ujung Kapuas, telah memberi kita cetak biru bahwa dunia bisa dibentuk kembali dengan kekuatan kolektif komunitas, dipandu oleh adat dan diperkuat oleh koperasi.

## Model Nasional

Apa yang terjadi terhadap Indonesia pada 2045 jika CUKK menjadi model nasional? Setidaknya ada tujuh hal yang akan terjadi. **Pertama**, aset dan jangkauan koperasi yang luar biasa. Pada tahun 2024, CUKK mempunyai aset Rp2,23 triliun dengan 230.000 anggota. Dengan naiknya aset per kapita koperasi secara drastis, masyarakat

tak lagi bergantung pada perbankan komersial.

Jika diproyeksikan pada 2045 (nasional) akan ada 10.000 koperasi serupa, maka total aset nasional koperasi diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun dengan anggota koperasi sebanyak 100 juta warga aktif. Dengan aset sebanyak itu, kontribusi koperasi terhadap PDB meningkat dari kurang dari 5% menjadi lebih dari 25% PDB nasional.

**Kedua**, dominasi ekonomi kerakyatan. Keberadaan CUKK, rantai pasok pangan, energi, dan layanan keuangan dikelola koperasi lokal secara efisien. Kemudian, distribusi nilai tambah kembali ke anggota, sehingga mendorong konsumsi berbasis komunitas dan produksi berbasis solidaritas. Bahkan tidak ada "wilayah tertinggal" karena koperasi aktif merata hingga di Papua, Kalimantan, NTT, hingga pelosok Sumatera.

**Ketiga**, lompatan literasi dan kedisiplinan keuangan. Hadirnya CUKK, anak-anak SD akan mendapat pelajaran keuangan yang diadopsi dari praktik CU Keling Kumang. Masyarakat luas pun akan lebih memahami mengenai bunga, risiko, investasi, dan perencanaan hidup. Keuntungan lainnya, angka kredit macet rendah, sehingga masyarakat lebih mandiri dan tangguh menghadapi tekanan ekonomi global.

**Keempat**, ekosistem ekonomi lokal yang resilien. Koperasi menjadi pusat pertumbuhan mikroregion. Nantinya akan ada CUKK Energi (energi surya desa), CUKK Edu (BMT + Beasiswa Gotong Royong), CUKK Agro (klaster tani dan peternak koperasi) dan urbanisasi terkendali, serta kualitas hidup di desa setara kota. Efeknya, kemiskinan struktural musnah. Desa bukan objek bantuan, tapi subjek pembangunan.

**Kelima**, generasi "Sarjana Koperasi" sebagai Pemimpin Baru. Ribuan lulusan Cooperative Grant University (CGU) menjadi CEO koperasi, menteri koperasi, dan inovator teknologi sosial. CGU menjadi *World Center for Cooperative Civilization*, dikunjungi delegasi dari *Global South*.

**Keenam**, transparansi dan akuntabilitas lintas sektor. Budaya audit internal, pendidikan nilai, dan pelaporan terbuka yang selama ini diterapkan di CUKK menjadi norma di koperasi dan lembaga publik. Bahkan praktik CU Keling Kumang soal keterbukaan keuangan akan ditiru BUMN dan lembaga negara.

**Ketujuh**, kedaulatan ekonomi dan budaya. Keberadaan CUKK menjadikan Indonesia sebagai pelopor ekonomi tropikal koperasi. Energi surya, pangan lokal, dan platform digital koperasi berskala ASEAN. Sistem ekonomi nasional juga tak hanya kompetitif tapi juga beretika, inklusif, dan berdaulat.

Jika koperasi seperti CU Keling Kumang membentuk DNA ekonomi nasional, maka 2045 bukan hanya Indonesia Emas, tapi Indonesia Bermartabat, Berdaulat, dan Berbagi.

Agus P/Yul



# Langgar Harga Minimal Ayam Hidup, Kena Kartu Merah

Peternak ayam mandiri kerap gonjang-ganjing ketika harus memasarkan produknya. Tidak stabilnya harga ayam hidup karena permainan perusahaan besar membuat mereka mengalami kerugian cukup besar. Sebagai bentuk komitmen, melindungi peternak rakyat, khususnya di sektor perunggasan, pemerintah tak akan ragu menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan harga minimal ayam hidup (*livebird*).

Sebelumnya pemerintah dan pemangku kepentingan sepakat menetapkan harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18 ribu/kg untuk semua ukuran bobot panen. Kebijakan itu, berlaku nasional mulai 19 Juni 2025. Pemerintah melalui Satgas Pangan akan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadi pelanggaran.

Sesuai Permentan No. 10 Tahun 2024, peredaran DOC (*day old chick*) dengan klasifikasi FS petelur dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS yang melakukan budidaya kepada pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak wajib memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, paling rendah 88% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk peternak.

Kedua, paling tinggi 10% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk pelaku usaha mandiri dan koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 ekor. Ketiga, paling tinggi 2% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sementara peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari pembibit PS yang tidak melakukan budidaya wajib memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya, paling rendah 90% produksi DOC FS dari pembibit PS dialokasikan untuk peternak. Sedangkan, paling tinggi 10% produksi DOC FS dari pembibit PS dialokasikan untuk pelaku usaha mandiri dan koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300 ribu ekor.

## Sanksi bagi Pelanggar

Dalam kunjungan lapangan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda mengatakan, pihaknya menemukan satu perusahaan terintegrasi berinisial NH yang menjual ayam hidup di bawah Rp18.000/kg. Terhadap perusahaan ini, pemerintah langsung memberikan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan Ditjen PKH.

Agung menegaskan, kesepakatan harga bukan sekadar soal angka, melainkan bentuk nyata perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternak mandiri. "Ini bukan hanya soal harga, tetapi tentang keadilan dan keseimbangan ekosistem. Tanpa harga yang layak, peternak kecil akan tumbang, dan ketahanan pangan nasional bisa ikut goyah," ujarnya.

Kalkulasi Kementerian Pertanian penerapan harga minimal Rp18.000/kg mampu mencegah potensi kerugian hingga lebih dari Rp1 triliun per bulan bagi peternak di Pulau Jawa. Perhitungan ini didasarkan pada selisih harga sebesar Rp3.000/kg dengan total produksi bulanan sekitar 38 juta ekor ayam.

Agung mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan. Ketahanan pangan menurutnya, tidak mungkin tercapai jika peternaknya terus merugi. "Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa usaha unggas berjalan sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat," katanya.

Agung juga menekankan pentingnya pendekatan Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp18.000/kg yang telah disepakati bersama peternak. Skema ini diyakini, mampu menstabilkan harga sekaligus memangkas peran perantara dalam rantai distribusi. "Dengan HPP ini,



peternak bisa lebih sejahtera dan mandiri," tegasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan komitmen harga berjalan sesuai aturan, Kementan bekerja sama dengan Satgas Pangan POLRI dalam melakukan pengawasan ketat di lapangan. Pemerintah juga tengah menyusun skema sanksi administratif bertahap bagi perusahaan yang membandel, termasuk penundaan rekomendasi impor bahan baku pakan.

"Temuan dari Kementerian sudah kami tindak dengan sanksi administrasi. Ke depan, kami akan telusuri apakah ada unsur pidana dalam kasus ini," ungkap AKP Ahmadi dari Satgas Pangan POLDA Jatim. Jika ditemukan pelanggaran hukum, lanjut Ahmadi, kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

## Sikap Ombudsman

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah konkret dalam membenahi tata niaga peternakan nasional. Langkah-langkah yang diambil Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai telah berada di jalur yang tepat dalam melindungi kepentingan peternak dan masyarakat luas.

"Kami melihat banyak perbaikan signifikan yang sudah dilakukan, meskipun tentu masih ada ruang untuk terus ditingkatkan," ujar Anggota Ombudsman, Yeka Hendra

Fatika, dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (1/7).

Salah satu langkah yang diapresiasi adalah pengendalian pasokan unggas secara tegas. Menurut Yeka, kebijakan ini penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan menghindari fluktuasi harga yang merugikan peternak.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menilai upaya Kementan dalam memperbaiki mekanisme impor pakan dan grand parent stock (GPS) patut diapresiasi. "Jika dilakukan secara konsisten, ini bisa memperkuat pondasi sektor perunggasan nasional," tambah Yeka.

Ia pun mendorong pelaku industri perunggasan dengan populasi lebih dari 60.000 ekor ayam per minggu agar memiliki atau menguasai rumah potong unggas (RPHU) sendiri. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat rantai pasok sekaligus mengurangi dominasi tengkulak.

Di sisi lain, harga produk peternakan seperti bibit sapi yang dijual melalui balai-balai Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai masih sangat terjangkau. Permintaan yang tinggi menjadi bukti nyata bahwa program ini diminati.

Namun, Yeka mengusulkan adanya evaluasi tarif untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi aksesibilitas bagi peternak. "Kami ingin balai tetap memberikan layanan terbaik sambil tetap menjaga keterjangkauan bagi para peternak," katanya. **Yul**



# Waspadai Anomali Brainrot terhadap Anak-anak

Dunia digital kini banyak dipenuhi dengan konten recek. Menonton konten recek memang salah satu cara menghibur diri atau menenangkan pikiran di tengah padatnya aktivitas. Namun perlu diwaspadai bahaya konten tersebut bagi anak-anak, karena dapat menyebabkan brainrot atau penurunan kemampuan kognitif serta psikologis seseorang.



Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Oxford English Dictionary pada tahun 2024 lalu dan menjadi Oxford Word of the Year. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, *brain rot* tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan, bahkan depresi.

*Brainrot* bisa dialami siapa saja yang memiliki kebebasan akses menggunakan internet, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Gejala yang dirasakan setiap orangpun bisa berbeda-beda. Misalnya, ditandai dengan terlalu banyak menerima informasi kurang penting, menurunnya daya ingat, mudah cemas, dan mata mudah lelah.

Ada beberapa cara mengatasi *brainrot* adalah dengan melakukan teknik pomodoro, menerapkan *screen time*, melakukan kurasi konten, dan lebih banyak melakukan aktivitas *offline*. Nah, Fenomena viral "Anomali Brainrot" yang ramai beredar di media sosial mulai menarik perhatian kalangan akademisi.

Salah satunya Dr Melly Latifah, dosen IPB University dari Divisi Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia. Menurutnya, di balik kelucuan konten absurd, seperti manusia berwujud pentungan kayu (tung-tung tung sahur), hiu memakai sepatu, atau *cappuccino* berkepala balerina, tersembunyi potensi dampak serius terhadap perkembangan anak dan remaja.

Ia menuturkan, pada anak usia dini yang masih berada pada tahap praoperasional menurut teori Piaget, konten absurd berisiko mengacaukan pemahaman terhadap realitas. Sebab, anak-anak belum mampu membedakan fantasi dan kenyataan.

"Visual yang *hiper-absurd* dapat memicu pelepasan dopamin secara berlebihan, yang berdampak pada fokus dan emosi," katanya. Selain itu, ungkap Melly, narasi yang tidak koheren dapat menghambat pemahaman struktur bahasa anak.

Sementara itu, pada kalangan remaja, paparan konten *absurd* secara terus-menerus dapat membentuk pola pikir tidak logis. Paparan berlebihan makin menguatkan pola pikir semakin tidak masuk akal, semakin menarik. "Ini mengurangi kemampuan berpikir sistematis," katanya. Bahkan lanjut Melly, konten semacam ini juga dapat mengikis empati karena sering kali menghilangkan konteks emosional dari suatu peristiwa.

## Pendekatan Tepat

Meski demikian, menurut Dr Melly, konten absurd tidak sepenuhnya berbahaya jika dikelola dengan pendekatan yang tepat. Ia menyebut bahwa dalam kondisi tertentu, konten seperti ini dapat merangsang kreativitas dan fleksibilitas berpikir. "Bagi balita, orang tua harus memberi penjelasan. Katakan saja, ini hanya khayalan AI (artificial intelligence, red) semata. Dalam dunia nyata, ikan hiu

tidak memakai sepatu," ujarnya.

Untuk remaja, Melly mengatakan, konten ini justru bisa menjadi sarana melatih kemampuan mengenali pola atau *pattern recognition*. Konten absurd menciptakan semacam *cognitive playground* yang melatih deteksi anomali, keterampilan yang sangat penting di era banjir informasi saat ini.

Untuk melindungi anak dari dampak negatif yang ditimbulkan, Melly menyarankan enam langkah yang dapat dilakukan orang tua. *Pertama*, bangun literasi digital. Orang tua perlu menjelaskan bahwa konten AI seperti mimpi aneh, bukan realitas. "*Kedua*, batasi akses. Aktifkan *restricted mode*, dengan membatasi durasi misalnya 5 menit per hari, dan hindari penggunaan gawai satu jam sebelum tidur," ucapnya.

Ketiga, ia melanjutkan, ubah konsumsi pasif menjadi aktif. Orangtua agar mengajak anak menganalisis konten *absurd*. Misalnya dengan memberikan pertanyaan, "Sebutkan tiga hal tidak masuk akal di video ini!"

Keempat, latih *cognitive anchoring*. Hubungkan konten absurd dengan fakta, seperti, "Hiu tidak berkaki, kan?" Kelima, edukasi bahaya absurditas. Jelaskan bahwa konsumsi berlebihan bisa mengubah jalur saraf, layaknya makan permen secara terus-menerus. Keenam, lakukan digital detox. "Apabila konsumsi sudah tak terkendali, matikan internet selama 3-7 hari dan ganti dengan aktivitas fisik atau

sosial langsung," saran Dr. Melly seperti dikutip dari laman *IPB.ac.id*.

## Dampak Brainrot bagi Anak

Istilah "brain rot" sendiri mencerminkan kondisi psikologis akibat gaya hidup digital masa kini yang dipenuhi scrolling tanpa henti, menonton secara maraton, dan multitasking. Dr Melly mengungkapkan, perilaku ini menyebabkan *cognitive overload*, kelelahan mental, dan berkurangnya fokus.

"Paparan berlebihan terhadap video berdurasi pendek mengubah preferensi otak terhadap stimulasi cepat," katanya. Karena itu, ia mengingatkan, penting bagi orang tua mengenali gejala awal "brainrot". Gangguan ini dapat muncul dalam bentuk kognitif, bahasa, emosi, maupun sosial.

"Anak bisa sulit konsentrasi, sering lupa instruksi sederhana, bicaranya patah-patah, atau kosakatanya menyusut. Secara emosional, mereka bisa tertawa histeris saat *online* tetapi datar ketika diajak bicara. Ada juga yang marah ketika gadget diambil," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap usia menunjukkan gejala berbeda. Misalnya, untuk Balita mungkin meniru gerakan *absurd* yang mereka lihat. Anak usia SD bisa mengalami penurunan nilai drastis. Sementara remaja mulai berkomunikasi dengan bahasa meme. Pendampingan orang tua juga sangat dibutuhkan pada anak-anak yang kecanduan gadget. **Yul**



# Hari Krida Pertanian 2025: Swasembada Dimulai dari Penyuluh dan Petani

Hari Krida Pertanian 2025 jadi panggung kebangkitan petani dan penyuluh! Dari ladang ke lumbung, mereka jadi aktor utama mewujudkan mimpi lamayakni swasembada pangan Indonesia.



Ribuan insan pertanian dari seluruh penjuru negeri membanjiri halaman Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (30/6/2025). Mereka datang bukan sekadar untuk memperingati Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53, tapi untuk merayakan kebangkitan sektor pertanian nasional. Tahun ini, HKP mengusung tema besar, "Transformasi Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian untuk Pencapaian Swasembada Pangan Nasional."

Sebanyak 3.000 peserta hadir dalam acara ini, mulai dari penyuluh pertanian, Babinsa, Brigade Pangan (BP), kelompok tani, koperasi pertanian modern, hingga mahasiswa. Mereka datang membawa semangat, membawa harapan, dan membawa bukti bahwa pertanian Indonesia sedang bergerak maju.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa peringatan HKP 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum sejarah. Untuk pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, sejak

berdirinya Perum Bulog pada 1969, cadangan beras pemerintah (CBP) menembus angka 4 juta ton. Hingga Juni 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal, lonjakan lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir.

Keberhasilan ini, kata Amran, merupakan buah dari gotong royong semua elemen bangsa dimana petani, penyuluh, TNI-Polri, pemerintah daerah, swasta, hingga BUMN pangan. Dan yang paling utama, ia menegaskan, adalah visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.

"Ini bukan keberhasilan Kementan semata. Ini keberhasilan Indonesia. Ini adalah kerja bersama untuk mewujudkan swasembada pangan," ujar Amran dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan panjang.

Dalam acara ini pula, Mentan meluncurkan dua program unggulan: Gapoktan sebagai titik serah pupuk bersubsidi dan Brigade Pangan Pertanian Modern sebagai penyalur BBM untuk alat mesin pertanian (alsintan). Program ini diharapkan

mampu mempercepat transformasi sistem distribusi input pertanian yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Gapoktan kini tak hanya berfungsi sebagai organisasi tani, tapi juga sebagai simpul distribusi pupuk bersubsidi. Sementara Brigade Pangan, dengan dukungan Pertamina Patra Niaga dan PIHC, akan memastikan BBM pertanian tersalurkan dengan cepat agar kegiatan tanam tidak tertunda.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi di lapangan, Kementan memberikan penghargaan kepada sepuluh penyuluh pertanian berprestasi dari berbagai provinsi. Mereka masing-masing mendapatkan satu unit sepeda motor sebagai simbol mobilitas dan semangat juang. Penghargaan ini juga diberikan kepada tiga kepala dinas provinsi dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Apresiasi didukung penuh oleh Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa keberhasilan pertanian tidak mungkin dicapai hanya oleh Kementerian Pertanian.

"Petani, penyuluh, Brigade Pangan, koperasi, pemda, kampus, bahkan sektor perbankan, semua harus berjalan bersama. Kita tak bisa lagi bertani dengan cara lama. Kita harus modern," kata Santi.

Ia juga menyebut bahwa Brigade Pangan saat ini telah menjadi motor penggerak transformasi pertanian di banyak wilayah. Mereka dilengkapi dengan pelatihan, benih unggul, dan peralatan canggih. Namun, bantuan pemerintah hanya diberikan sekali. Selanjutnya, mereka harus mandiri dan menyusun rencana usaha tani mereka sendiri.

"Brigade Pangan adalah simbol lompatan dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga menghitung, mengelola, dan memasarkan," ujarnya. **BPPSDMP**



## Bermodal Inovasi, Subasu Ubah Wajah Koperasi Tradisional

Bermodal inovasi dan kemitraan cerdas, Koperasi Subasu di Blitar sukses mengubah citra koperasi tradisional jadi pusat produksi buah modern yang menguntungkan petani dan pemilik modal.

Di tengah dominasi koperasi simpan pinjam, hadir satu nama yang mencuri perhatian karena pendekatannya yang berbeda. Koperasi Semua Bisa Sukses (Subasu) di Kabupaten Blitar menantang pakem lama koperasi dengan fokus pada produksi buah modern, bukan jasa keuangan. Lewat sistem kemitraan yang inovatif, Subasu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam usaha perkebunan tanpa harus memiliki lahan atau waktu berkebun.

Sejak berdiri pada tahun 2020, Subasu telah konsisten mengembangkan dua komoditas unggulan yakni durian dan kelengkeng. Uniknya, koperasi ini mengusung konsep kemitraan berbasis hasil kebun, di mana siapa saja bisa ikut serta menjadi pemilik kebun buah modern, meskipun tidak memiliki lahan atau pengalaman bertani.

Di tahun 2025, Subasu mengambil langkah besar dengan

memfokuskan pengembangan pada perkebunan kelengkeng modern. Bibit yang digunakan merupakan hasil rekayasa genetik dari Thailand, sehingga mampu berbuah tanpa mengenal musim. Artinya, petani bisa menentukan sendiri kapan ingin pohonnya berbuah dan kapan memanen.

"Ini varietas pertama di Indonesia dan saat ini baru ada di Blitar. Kami kembangkan bibit ini sejak 2022, langsung dari Thailand," terang Rusda.

Keunggulan kelengkeng varietas baru ini tidak hanya terletak pada kualitas buah dan produktivitas, tetapi juga kontrol penuh di tangan petani, sebuah pendekatan yang sangat jarang dilakukan dalam budidaya buah tropis.

Salah satu kekuatan utama Subasu adalah model bisnis simbiosis mutualisme yang ditawarkan kepada mitra. Koperasi bertanggung jawab mulai dari penyediaan bibit, pendampingan teknis, perawatan tanaman, hingga penyerapan



hasil panen. Sementara mitra menyediakan modal.

"Semua hasil dibagi 50-50. Keuntungannya jelas, transparan, dan yang terpenting, petani tidak perlu pusing soal pemasaran karena koperasi siap membeli hasil panen mereka," tegas Rusda.

Model ini terbukti menarik. Jumlah mitra Subasu kini sudah mencapai ribuan. Meskipun pengembangan kelengkeng masih berfokus di Kabupaten Blitar, minat dari luar daerah mulai berdatangan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan peluang usaha

pertanian modern.

"Koperasi Subasu ini bukan tempat simpan pinjam. Kami koperasi produksi. Fokus kami ada di lapangan, di kebun, di hasil nyata. Ini waktunya kita naik kelas," ucapnya.

Dengan mengandalkan inovasi teknologi, varietas unggul, dan manajemen berbasis kemitraan, Subasu membuktikan bahwa koperasi bisa menjadi aktor penting dalam modernisasi pertanian. Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tapi juga sebagai model baru koperasi berbasis produksi yang inklusif dan berkelanjutan. **Gsh**



TABLOID  
**SinarTani**  
PERTANIAN INDONESIA BARU

# SELAMAT HARI KOPERASI INDONESIA

12 JULI 2025



TABLOID  
**SinarTani**  
PERTANIAN INDONESIA BARU

SINTA TV

## PRICE LIST BERLANGGANAN

SINAR TANI CETAK

**RP. 16.000**

Per Edisi  
Minimum Pembelian

RP 64.000/BLN  
RP 768.000/THN

SINAR TANI EPAPER

**Rp. 72.000/ Thn**

### CONTACT

081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)  
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)  
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)  
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)



Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Whatsapp : .....

Email : .....

Jabatan : .....

No rek : 127.0096.016.587

Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

[sinartani.co.id](http://sinartani.co.id)

[tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)

@SinarTaniST

[tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)

SINTA TV

SINTA TV



# Akses KUR Dipermudah, Nafas Baru Petani Tebu

Pemerintah memberikan kemudahan kepada petani tebu untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara berulang. Kebijakan ini membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.



**P**ermodalan, bagi petani memang krusial. Tanpa modal, petani akan sulit berusaha tani. Apalagi untuk komoditas yang memerlukan modal cukup besar, seperti dalam budidaya tebu. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan kredit murah melalui program KUR.

Sayangnya, petani tebu yang sudah bisa mendapatkan modal dari KUR hanya bisa mengakses sekali. Selanjutnya harus menggunakan kredit komersial. Ketentuan tersebut cukup memberatkan bagi petani. Bahkan bisa berdampak pada program pemerintah lainnya yakni swasembada gula.

Keluhan petani tersebut akhir mendapat respon dari pemerintah. Usai Rapat Koordinasi Kemenko Perekonomian di Jakarta, beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, maka kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal. "Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau petani sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam

skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

"Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan," jelasnya.

Kebijakan ini merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal. Amran berharap kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkan di musim tanam yang sedang berlangsung.

"Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan," ungkapnya.

Amran juga mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan, khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional. Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan.

Sebelumnya saat Rapat Kerja Pengembangan Tebu di Kantor PT SGN di Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Juni lalu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga mengungkapkan upaya perbaikan sistem KUR untuk petani tebu. Selama ini mekanisme

KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

"Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah ini kan menghambat," kata Amran.

## Enam Strategi Swasembada Gula

Mentan Amran merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu hingga penyediaan sarana produksi. Pemerintah juga memberikan kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat swasembada gula nasional. Dalam acara "Rembuk Tani Bersama Wakil Presiden RI" di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisucipto, Sleman, Yogyakarta (8/7), Mentan Amran mengungkapkan kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendukung petani dengan skema jaminan harga, pembiayaan tanpa agunan, serta program bongkar ratun nasional.

Amran memaparkan sejumlah terobosan konkret yang sedang dijalankan pemerintah. Mulai dari alokasi dana Rp1,5 triliun untuk menjaga harga gula petani minimal Rp 14.500/kg. Selain itu, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tak

lagi akumulatif, skema apalis yang menjamin petani dapat mengakses kredit tanpa agunan.

"Itu harga dasar yang tidak boleh turun. Ini instruksi Presiden dan Wapres. Kami juga ubah skema KUR agar petani bisa akses kredit tanpa akumulasi. Bahkan, nanti kredit bisa dipotong langsung dari hasil tebu di pabrik, tanpa agunan," jelas Amran.

Pemerintah juga menyiapkan program bongkar ratun atau replanting selama tiga tahun berturut-turut. Target peremajaan tanaman seluas 500 ribu hektar di seluruh Indonesia. Dengan program ini diharapkan produktivitas tanaman akan meningkat.

"Kami pastikan semua ekosistem pendukung, benih, pupuk, pompa, teknologi, hingga regulasi. Setelah itu, kami akan kawal langsung di lapangan. Yang tidak produktif, kami evaluasi. Tapi yang serius, pasti kami dukung penuh," ujar Amran.

Data terbaru menunjukkan, Indonesia saat ini memiliki 796.621 petani tebu yang mengelola 520.823 hektare lahan panen. Sebanyak 83,5% tebu di Jawa berasal dari petani rakyat, namun mayoritas adalah tanaman ratun tua yang menyebabkan penurunan rendemen.

Kajian menunjukkan bongkar ratun dapat meningkatkan produksi hingga 15,5 ton/ha dan rendemen dari 7,29% menjadi 7,65%. Namun, implementasinya masih terbatas pada 8,27% lahan, jauh dari standar ideal 20%. Sebagai informasi, produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton. **Yul**



# Cantik dengan Patikan Kebo

Patikan kebo, tanaman liar yang banyak ditemukan ditepi jalan, ternyata memiliki sejumlah kandungan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Tanaman yang biasa disebut daun biji kacang merupakan gulma yang dianggap mengganggu dalam dunia pertanian.

**D**r Dimas Andrianto, peneliti dan dosen IPB University mengatakan, ada manfaat kesehatan yang tidak pernah disangka dari daun dari tanaman gulma ini. Patikan kebo mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, fenolik, tanin, terpenoid, saponin, steroid, dan antrakuinon. Senyawa-senyawa ini memiliki potensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antifungi, dan antiseptik.

"Patikan kebo berpotensi digunakan untuk mengatasi jerawat karena kandungan antiseptiknya, meskipun uji antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat menunjukkan aktivitas yang kurang signifikan," jelas dosen Departemen Biokimia IPB University itu.

ia mengungkapkan, tanaman ini juga memiliki aktivitas antioksidan dan dapat menghambat enzim tyrosinase, yaitu enzim yang

berperan dalam pembentukan pigmentasi kulit. Dengan aktivitas tersebut, patikan kebo berpotensi dikembangkan sebagai bahan pemutih kulit.

Meski begitu, Dr Dimas menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan lebih lanjut oleh pihaknya terkait efektivitas patikan kebo untuk mengobati kutil atau papilloma, sebagaimana disebutkan dalam unggahan di media sosial. Namun, ia mengakui telah melakukan penelitian terhadap penggunaan tanaman ini sebagai bahan aktif serum wajah.

"Sebagian besar patikan kebo masih tumbuh liar, meski sudah mulai ada yang membudidayakan sebagai tanaman obat," tuturnya. Karena itu, menurutnya penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanaman ini.

Masyarakat umumnya memanfaatkan Patikan Kebo sebagai obat tradisional asma. Karena itu, kerap



dikenal dengan nama tanaman asma. Daun herbal ini diketahui memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu untuk meredakan peradangan saluran pernapasan yang menyebabkan asma.

Pada tanaman ini, ditemukan juga kandungan yang mirip dengan obat antiastatik yang memberikan efek rileks terhadap saluran udara (bronkus). Obat antiastatik biasa digunakan untuk membantu mengurangi gejala asma.

Selain itu, patikan kebo dipercaya mengatasi berbagai infeksi. Daun patikan kebo ternyata bisa digunakan untuk membantu mengobati iritasi pada permukaan kulit. Pasalnya, ada kandungan flavonoid yang bisa meredakan radang dari

iritasi. Flavonoid juga mampu mempercepat proses penyembuhan luka dengan merangsang lebih banyak aliran darah kaya oksigen dan nutrisi ke kulit.

Masyarakat juga meyakini daun herbal ini dapat dijadikan sebagai obat alami diare karena tanaman ini memiliki kandungan *quercetin* yang diketahui dapat membantu mengatasi diare. Hal ini karena *quercetin* dapat membantu mengurangi cairan di feses dan mengendurkan pergerakan usus. Daun ini juga mengandung asam *caffeic* dan asam *epicatechin 3-gallate* yang memiliki sifat antimikroba. Potensi antimikroba ini membantu membunuh bakteri penyebab diare. **Yul**



**MASYARAKAT PERBENIHAN DAN PERBIBITAN INDONESIA (MPPI)  
&  
ASOSIASI PERBENIHAN INDONESIA (ASBENINDO)  
MENGUCAPKAN**

*Selamat dan Sukses Atas dilantikannya*



**Dr. Muhammad Agung Sunusi, S.P., M.Si.**

Sebagai  
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat,  
Direktorat Jenderal Hortikultura



**Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.**

Sebagai  
Direktur Perbenihan tanaman Pangan,  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan



**Ir. Tommy Nugraha, MM.**

Sebagai  
Direktur Perbenihan Hortikultura,  
Direktorat Jenderal Hortikultura



# Perombakan Besar-besaran di Ragunan



Perombakan besar-besaran terjadi di Kementerian Pertanian, terutama di jajaran pejabat eselon 2. Sebanyak 25 pejabat Kementerian Pertanian resmi dirotasi ke posisi strategis. Ada yang naik jabatannya, ada juga yang harus bergeser. Tapi sebagian memang muka-muka lama.

Rotasi tersebut dalam upaya memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung akselerasi program strategis sektor pertanian. Pelantikan pejabat Kementerian Pertanian digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan Jakarta, Rabu (9/7).

“Rotasi ini adalah bentuk penyegaran dan bagian dari strategi besar untuk memperkuat sistem

kerja yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Rotasi jabatan ini juga diharapkan bisa memperkuat peran masing-masing unit kerja dalam menjalankan tugas strategis seperti program pompanisasi, regenerasi petani, hilirisasi produk, serta percepatan swasembada pangan.

Rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 501/Kpts./Kp.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemin-dahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Gsh

Nama Pejabat dan Posisi Baru

| No                                            | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) | Posisi                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | Seta Rukmalasari Agustina S.P., M.M.A., M.Sc  | Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal                                                                            |
| 2                                             | Dr. Ir. Hermanto, M.P.                        | Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian              |
| 3                                             | Mulyono, S.P., M.M                            | Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian        |
| 4                                             | Dr. Rachmat, S.Si, M.Si.                      | Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan                                                                    |
| 5                                             | Tiurmauli Silalahi, SP, M.M                   | Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan                                             |
| 6                                             | Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc         | Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan                                                   |
| 7                                             | Ardi Praptono, S.P., M.Agr                    | Direktur Pelindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan                                                  |
| 8                                             | Dr. Muhammad Agung Sunusi, SP, M.Si           | Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura                                                      |
| 9                                             | Ir. Tommy Nugraha, M.M.                       | Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura                                                       |
| 10                                            | Ir. Baginda Siagian, M.Si                     | Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan                                            |
| 11                                            | Dr. Abdul Roni Angkat                         | Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan                                                     |
| 12                                            | Kuntoro Boga Andri, S.P., M.Agr., Ph.D        | Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan                                                     |
| 13                                            | Dr. drh. Nuryani Zainuddin, M.Si              | Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                            |
| 14                                            | drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.              | Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                             |
| 15                                            | Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si.                | Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                              |
| 16                                            | Tri Melasari, S.Pt., M.Si                     | Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                       |
| 17                                            | Husnain, SP, M.P., Ph.D                       | Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian                          |
| 18                                            | Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA                 | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian               |
| 19                                            | Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.               | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian                   |
| 20                                            | Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si         | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian                 |
| Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) |                                               |                                                                                                                          |
| 1                                             | Andi Muhammad Idil Fitri, S.E., M.M           | Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan |
| 2                                             | Faisal, S.P., M.P                             | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan                   |
| 3                                             | drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.                 | Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                   |
| 4                                             | drh. Imron Suandy, M.V.P.H.                   | Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan                                |
| 5                                             | Gunawan, S.P., M.Si.                          | Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian          |

## Baru 3 Bulan, Dirut Perum Bulog Diganti

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum BULOG. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG dan kembali melanjutkan karir dan Pengabdian di TNI.

Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Menteri BUMN menunjuk Direktur Pengadaan, Prihasto Setyanto. Sebelum bertugas di Bulog, Prihasto merupakan pejabat karir di Kementerian Pertanian,

sempat menjadi Dirjen Hortikultura dan Plt Sekjen Kementerian Pertanian, serta staf ahli Menteri Pertanian.

Tiga hari setelah keputusan pergantian Dirut Perum Bulog, Menteri BUMN kembali menetapkan Dirut Perum Bulog yang baru. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, Mayor Jendral TNI Achmad Rizal Ramdhani resmi diangkat menjadi Direktur Utama Perum Bulog baru.

Pergantian Dirut Perum Bulog, dalam dua tahun terakhir ini berlangsung cepat. Hampir tidak ada yang bertahan lebih dari satu tahun setelah kepemimpinan Budi Waseso. Prof. Bayu Krisnamurti hanya bertahan sekitar 10 bulan menjadi



Dirut Perum Bulog, kemudian diganti Wahyu Suparyono. Nasibnya pun hampir sama dengan Dirut Bulog sebelumnya, Wahyu hanya diberi kesempatan sekitar 3-4 bulan saja menakhkodai Perum Bulog.

Setelah Wahyu, Menteri BUMN menunjuk tentara aktif Novi Helmy Prasetya sebagai penggantinya. Namun jabatan Novy juga tak lama. Semua serba mendadak. Ada apa dengan Bulog? Yul



# Dollipop, Kreasi Unik Mahasiswa Vokasi IPB

Lima mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL) sukses mengembangkan Dollipop, sebuah produk Doll Bouquet pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi Augmented Reality (AR).



Produk ini tidak hanya menjadi pionir dalam memadukan visual fisik dan konten digital, tetapi juga menghadirkan cara baru dalam menyampaikan pesan emosional melalui hadiah.

Dollipop merupakan buket boneka yang menampilkan satu boneka utama dikelilingi oleh boneka kecil. Melalui aplikasi khusus, pengguna dapat memindai marker tersembunyi pada boneka dan mengakses berbagai konten digital seperti pesan video, galeri foto, musik, dan animasi.

Muhammad Aqil Musthafa Ar Rachman, CEO Dollipop menjelaskan, inovasi ini memungkinkan pengalaman personalisasi yang unik

dan menyentuh. "Dollipop bukan sekadar produk, tetapi sebuah pengalaman baru bagi para *gift seeker* dan *memory maker* yang ingin memberikan hadiah lebih bermakna," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa integrasi AR menjadikan proses pemilihan dan desain buket lebih menyenangkan, interaktif, dan realistis. Teknologi AR dalam produk ini dirancang ramah pengguna cukup dengan menginstal aplikasi Dollipop, memindai boneka, dan konten digital langsung muncul di layar ponsel. Tak perlu keahlian teknis untuk menikmati pengalaman ini.

Tim pengembang Dollipop terdiri dari Muhammad Aqil Musthafa Ar Rachman, Nurrizkyta Aulia Hanifah,

Nasywa Shafa Salsabila, Marsya Halya Alfrida, dan Anka Luffi Ramdani. Mereka adalah mahasiswa TRPL Sekolah Vokasi IPB University.

Berangkat dari pemahaman dasar tentang AR yang diperoleh di mata kuliah Teknologi Virtual, mereka menginisiasi proyek ini di bawah bimbingan dosen Amata Fami, MDs dan Faldiena Marcelita, ST, MKom. Proyek ini juga bagian dari mata kuliah Technopreneurship.

Inovasi ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak dan berhasil meraih posisi Top 10 dalam program Rocket Youthpreneur Bogor. Belum lama ini, mereka juga mendapat kesempatan pitching langsung dengan investor dari Saratoga Investama.

Program ini merupakan bagian

dari inisiatif Sandination oleh Dr H Sandiaga Salahuddin Uno, serta didukung oleh Program Mahasiswa Wirausaha dan Direktorat Pengembangan Karir, Kewirausahaan dan Hubungan Alumni IPB University.

"Dukungan ini sangat berharga bagi kami untuk mengembangkan inovasi dan memperkenalkan Dollipop ke pasar yang lebih luas," tutur Marsya Halya Alfrida seperti dikutip dari laman IPB.ac.id.

Dollipop menjadi bukti kuat bagaimana mahasiswa mampu melahirkan solusi inovatif yang menggabungkan teknologi, kreativitas, dan empati. Produk ini bukan sekadar buket boneka, tetapi simbol revolusi digital dalam industri hadiah personal. **TPL/ASW/Rz/Yul**

## Madu Bunga, Sebar Aroma Manis di Istanbul



Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor. Madu Bunga Ningrum, mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 4, berhasil meraih Juara 1 (Champion) pada ajang International Business Case Competition 2025 yang diselenggarakan Istanbul University, Turki, awal tahun ini.

Kompetisi bergengsi tingkat dunia ini diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi ajangadu strategi bisnis dengan kasus-kasus nyata berskala global. Madu menjadi satu-satunya

perwakilan dari perguruan tinggi vokasi pertanian Indonesia yang berhasil masuk dalam tim lintas universitas bersama mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Binus University, Universitas Pelita Harapan, dan Prasetya Mulya.

"Awalnya saya hanya ingin mencoba, setelah ikut seleksi internal akhirnya terpilih mewakili tim. Saya tidak menyangka bisa bergabung dengan mereka, tapi saya yakin tidak ada yang tidak mungkin," ujar Madu penuh semangat.

Langkahnya dalam kompetisi internasional ini tidak main-main. Ia menjalani persiapan yang sangat intens bersama tim, mulai dari mempelajari kasus bisnis internasional, latihan analisis pasar dan strategi pemasaran global, hingga simulasi presentasi dan diskusi rutin lintas negara.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah perbedaan bahasa dan budaya kerja dalam tim internasional, serta tekanan waktu untuk mengolah data bisnis yang kompleks. Namun semua itu terbayar lunas ketika nama timnya diumumkan sebagai pemenang.

"Rasanya luar biasa, bangga, dan terharu karena kerja keras kami akhirnya membuahkan hasil. Bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional adalah pengalaman yang tak ternilai," kata Madu.

Selain mendapatkan sertifikat resmi, tim pemenang juga memperoleh hadiah uang sebesar TRY 47.000 (empat puluh tujuh

ribu Lira Turki), atau sekitar Rp24 juta. Keikutsertaan Madu dalam ajang internasional ini bermula dari informasi yang didapatkan melalui program internasional kampus, hasil kerja sama dengan sejumlah universitas di Turki. Rasa penasarannya yang besar membawa langkahnya sampai ke Turki.

Setelah memenangkan kompetisi, Madu berencana untuk terus mengasah kemampuan bisnis dan komunikasi internasionalnya. Ia juga bertekad mengikuti kompetisi lain serta memperluas pengalaman melalui program magang. Saat ini, ia telah menjalani magang di Diaspora Unggul, memperkuat jaringan dan kemampuan profesionalnya.

Kisah Madu Bunga Ningrum bukan hanya menjadi kabar membanggakan bagi keluarga besar Polbangtan, tetapi juga menjadi inspirasi nasional. Ia membuktikan bahwa anak petani dari lembaga pendidikan vokasi pun bisa berdiri sejajar di panggung dunia.

Dari desa menuju dunia, dari tanah tumbuh harapan. Kini Madu telah menunjukkan bahwa pertanian bukan sekadar mencangkul tanah, tapi juga menggenggam peluang dan menciptakan solusi bisnis global.

**Wsd/Gsh**